

# LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DJBC  
KALIMANTAN BAGIAN BARAT



# LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN  
BAGIAN BARAT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di sepanjang tahun 2024 untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan *achievement* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat secara meyakinkan telah membukukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 118,57 dengan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang seluruhnya mendapatkan predikat di atas ekspektasi.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sepanjang tahun 2024, realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah sebesar Rp456.904.353.000,00 atau capaian sebesar 103,46% dari target yang telah ditetapkan.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, khususnya kepada para pegawai yang ada di garda terdepan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas. Terus jaga integritas dan profesionalisme demi mewujudkan Bea Cukai Makin Baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan DJBC pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik  
Imik Eko Putro

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah instansi vertikal di bawah DJBC setingkat Eselon II. Untuk mendukung Visi dan Misi DJBC, telah ditetapkan tujuan organisasi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Nomor KEP-81/WBC.14/2024 Tentang Penetapan Tujuan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Tujuan organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yaitu:

- 1. Mengoptimalkan pelayanan dan penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- 2. Mengoptimalkan pengawasan barang antar lintas negara serta pengawasan di bidang cukai;
- 3. Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat;
- 4. Mewujudkan pengelolaan organisasi yang kredibel dan akuntabel; dan
- 5. Meningkatkan citra positif Kementerian Keuangan di masyarakat.

Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis beserta arahan kebijakan dan strategi-strategi selama periode tahun 2024. Selanjutnya, untuk pelaksanaan tahun 2024, telah disusun Peta Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 yang telah ditandatangani bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat masuk dalam kategori Istimewa dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 118,57. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (115,87), *Customers Perspective* (120), *Internal Process Perspective* (119,50), dan *Learning and Growth Perspective* (119,73). Berikut rincian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024:

| No. | Sasaran Program/<br>Kegiatan                | Indikator Kinerja |                                                             |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran          | 1a-N              | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal | 2a-N              | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor   |

| No. | Sasaran Program/<br>Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal            | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                                  |
| 4   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif   | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai               |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 | 5a-N              | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                         |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N              | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                            |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan           |
|     |                                                                            | 7b-N              | Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai                             |
| 8   | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                               | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             |
|     |                                                                            | 8b-N              | Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai                                    |
| 9   | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif               | 9a-N              | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              |
|     |                                                                            | 9b-N              | Persentase efektivitas patroli laut                                                   |
| 10  | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                          | 10a-N             | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       |
|     |                                                                            | 10b-N             | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal |
| 11  | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                  | 11a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             |

| No. | Sasaran Program/<br>Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                         | 11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi |
| 12  | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran            |

Tabel 1.1 sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024

## B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan program reformasi DJBC pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2024, antara lain:

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di perbatasan jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan di perbatasan dengan Malaysia;
2. Belum optimalnya penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per-13/BC/2022 tentang Manajemen Karier di Lingkungan DJBC. Adapun masih terdapat pegawai yang pola mutasinya belum adil merata sehingga menyebabkan demotifasi bagi Sebagian para pegawai yang di tempat tugaskan di *Remote Area*;
3. Belum optimalnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK52/PMK.04/2019 tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang masih terjadi kendala teknis di lapangan;
4. Masih adanya pelanggaran terkait IMEI di Pos Lintas Batas Negara;
5. Masih adanya jalur tidak resmi di perbatasan yang penanganannya harus terintegrasi antar Bea Cukai, TNI, dan otoritas daerah setempat. Jalur tidak resmi tersebut merupakan salah satu jalur utama terjadinya penyelundupan dari Malaysia;
6. Penerimaan Bea Keluar Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat selama ini didominasi dari ekspor bauksit serta CPO dan turunannya. Pelarangan ekspor bauksit sangat berdampak pada penerimaan pada tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan performa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dalam mencapai sasaran strategis, maka dilakukan beberapa upaya secara bertahap dengan:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat khususnya yang membidangi Kepegawaian untuk menambah jumlah SDM di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di Perbatasan;
2. Telah dilakukan analisis mengenai kebutuhan jumlah SDM, Sarana Prasarana dan Rencana Anggaran tahun 2025 terkait pembukaan Pos Pengawasan dan Kantor Bantu Exit Entry Point di Wilayah Kalimantan Bagian Barat dengan menyampaikan presentasi ke Sekretariat DJBC;
3. Telah dibuat kajian dengan judul Optimalisasi Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019 Terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor di Wilayah Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat (Studi Kasus: KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong);
4. Telah diterapkan aturan terbaru terkait dengan penambahan pembebanan PDRI terkait importasi IMEI HKT yang telah dilengkapi dengan database harga dan melakukan upaya pengawasan serta melakukan penindakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sebagai efek jera;
5. Telah dilakukan *one on one Knowing Your Employee* terhadap seluruh pegawai sehingga dapat memetakan durasi pegawai, kondisi khusus dan tertentu dan hal – hal lain yang bersifat alasan kemanusiaan untuk dapat dikoordinasikan ke Sekretariat DJBC;
6. Menggunakan Manajemen Risiko dalam pengawasan Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas, serta menggunakan Aplikasi SIPINTAR yang terintegrasi dan dikelola oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat;
7. Melakukan koordinasi, sinergi, dan patroli bersama dengan Aparat Penegak Hukum yang berkepentingan di perbatasan, khususnya dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga melakukan pemetaan titik rawan jalur penyelundupan di perbatasan;
8. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melakukan diskusi dan *sharing session* dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti eksportir dan instansi terkait. Selain itu, juga dilakukan *extra effort* untuk memaksimalkan penerimaan dari ekspor atau impor komoditi lain yang melalui Kalimantan Barat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Ringkasan Eksekutif..... ii

Daftar Isi..... vi

Daftar Tabel..... vii

Daftar Grafik..... viii

Daftar Gambar..... ix

Daftar Lampiran..... x

BAB I Pendahuluan..... 1

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 1

    C. Sumber Daya Organisasi..... 4

    D. Sistematika Pelaporan..... 6

BAB II Perencanaan Kinerja..... 7

    A. Perencanaan Strategis..... 7

    B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 7

    C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 9

BAB III Akuntabilitas Kinerja..... 11

    A. Capaian Kinerja Organisasi..... 11

    B. Realisasi Anggaran..... 48

    C. Kinerja Lainnya..... 50

BAB IV Penutup..... 54

Lampiran..... 56



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024..... ii

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana..... 5

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja..... 9

Tabel 3.1 Sasaran Program, IKU, Target, dan Realisasi..... 14

Tabel 3.2 Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan dan Cukai..... 16

Tabel 3.3 Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan dan Cukai..... 16

Tabel 3.4 UMKM Binaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat..... 17

Tabel 3.5 UMKM Binaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang Melakukan Ekspor Tidak Langsung di 2024..... 20

Tabel 3.6 Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar..... 21

Tabel 3.7 Penyidikan 2024..... 26

Tabel 3.8 Poin Komponen Perhitungan Sub IKU BKC..... 26

Tabel 3.9 penegahan dan penindakan NPP..... 27

Tabel 3.10 Kajian Pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat 2020 s.d. 2024..... 37

Tabel 3.11 Realisasi IKU “Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai” ..... 40

Tabel 3.12 Realisasi IKU “Persentase efektivitas patroli laut” ..... 41

Tabel 3.13 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024..... 45

Tabel 3.14 Highlight Risk Event..... 46

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran TA 2022 s.d. 2024..... 50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... 4

Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Usia..... 4

Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... 5

Grafik 3.1 Status Capaian IKU Kanwil DJBC Kalbagbar..... 12

Grafik 3.2 Penerimaan Bea Masuk Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2024 (dalam juta Rupiah)... 22

Grafik 3.3 Perkembangan Kolom Tarif CPO dan Produk Turunannya 2024..... 23

Grafik 3.4 Penerimaan Bea Keluar Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2024 (dalam juta Rupiah)... 24

Grafik 3.5 Penerimaan Cukai Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2024 (dalam juta Rupiah)..... 25

Grafik 3.6 Capaian IKU IKPJ 2019 s.d. 2023 (Skala 5)..... 30

Grafik 3.7 Capaian IKU IKPJ 2024 (Skala 4)..... 31

Grafik 3.8 Hasil SKPJ Tahun 2024..... 32

Grafik 3.9 Hasil SKM Tahun 2024..... 32

Grafik 3.10 Highlight Risk Event..... 47

Grafik 3.11 Perbandingan Pagu Anggaran TA 2022 - 2024..... 50

Grafik 3.12 Penyerapan Anggaran TA 2022 s.d. 2024..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Strategi..... 7

Gambar 3.1 Dokumentasi Penindakan NPP pada tanggal 29 Maret 2024..... 28

Gambar 3.2 Dokumentasi Penindakan NPP pada tanggal 06 April 2024..... 29

Gambar 3.3 Dokumentasi Penindakan NPP pada tanggal 21 April 2024..... 29

Gambar 3.4 Piagam Penghargaan..... 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024.....56

Lampiran II Adendum Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024.....61

Lampiran III Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2025.....62

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat merupakan salah satu instansi vertikal DJBC yang mempunyai peran penting dalam menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat membawahi 6 satuan kerja vertikal setingkat Eselon III yaitu: KPPBC TMP B Pontianak, KPPBC TMP C Ketapang, KPPBC TMP C Sintete, KPPBC TMP C Nanga Badau, KPPBC TMP C Jagoi Babang, dan KPPBC TMP C Entikong. 4 satuan kerja di antaranya memiliki perbatasan antar negara, yaitu: KPPBC TMP C Sintete (Pos Lintas Batas Negara Aruk), KPPBC TMP C Entikong (Pos Lintas Batas Negara Entikong), KPPBC TMP C Nanga Badau (Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau), dan KPPBC TMP C Jagoi Babang (Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang).

Sebagai salah satu instansi vertikal pemerintah, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah Instansi Vertikal DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;

- b) Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c) Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC;
- f) Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g) Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i) Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai
- k) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat terdiri dari:

### **a. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

### **b. Bidang Kepabeanan dan Cukai**

Bidang Kepabeanan dan Cukai bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

c. Bidang Fasilitas Kepabeanan

Bidang Fasilitas Kepabeanan bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

d. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patrol dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

e. Bidang Kepatuhan Internal

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian internal, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

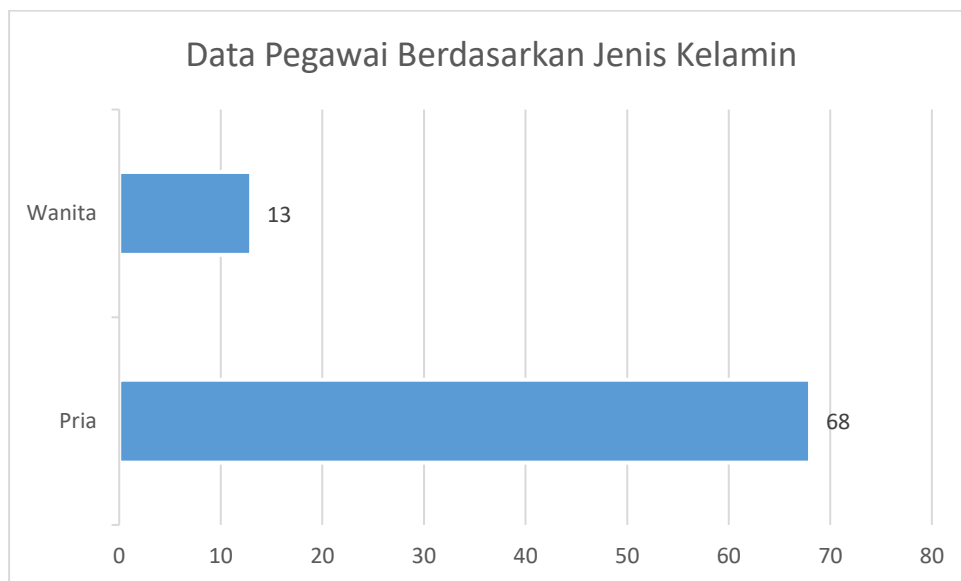
Selain itu Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga membawahi Enam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang terdiri dari:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak;
2. KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong;
3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete;

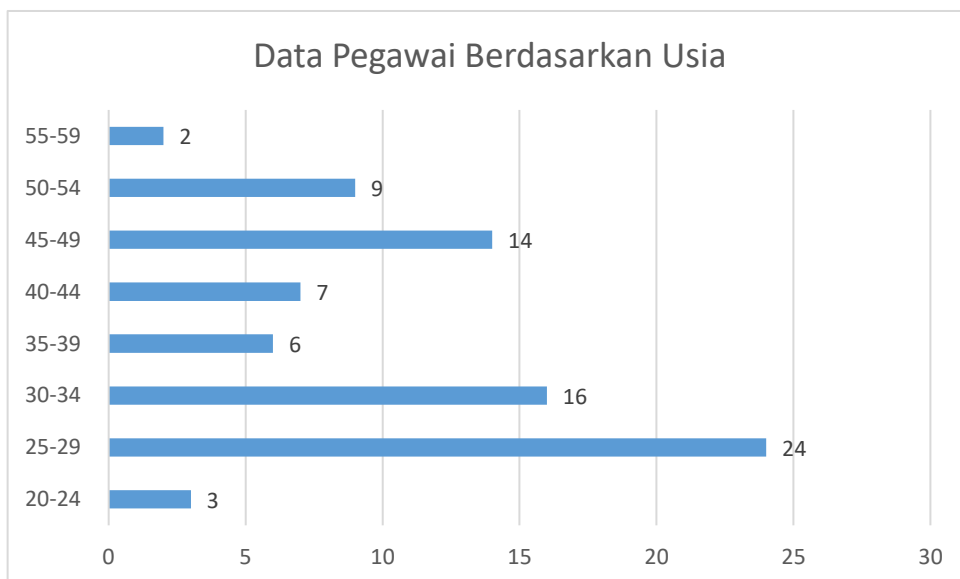
4. KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang;
5. KPPBC Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang; dan
6. KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau.

### C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 81 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

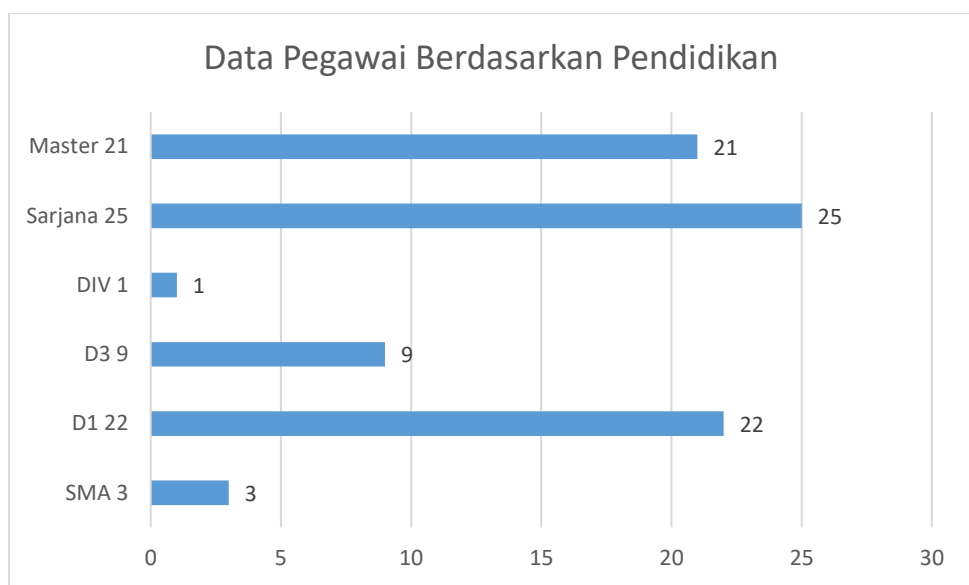


Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Usia





Grafik 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Selain itu Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kinerja berupa:

| Jenis BMN                      | Jumlah NUP | Nilai Perolehan (Rp) |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| Tanah                          | 30         | 147.493.632.000      |
| Gedung Bangunan                | 12         | 4.957.242.664        |
| Rumah Negara                   | 56         | 8.023.193.000        |
| Peralatan Dan Mesin Non TIK    | 741        | 6.798.271.576        |
| Peralatan Dan Mesin Khusus TIK | 106        | 1.213.064.958        |
| Alat Angkutan Bermotor         | 25         | 7.425.213.402        |
| Alat Besar                     | 5          | 413.813.163          |
| Alat Persenjataan              | 33         | 226.270.000          |
| Aset Tetap Lainnya             | 6          | 1.101.345.424        |

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumber daya organisasi lainnya berupa anggaran, pada Tahun Anggaran 2024, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat memiliki Pagu DIPA sebesar Rp8.430.847.000,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan komposisi Belanja Barang sebesar Rp6.750.266.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh

enam ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp1.680.581.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- C. Sumber Daya Organisasi;
- D. Sistematika Pelaporan.

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

- A. Perencanaan Strategis;
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Realisasi Anggaran;
- C. Kinerja Lainnya.

7. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

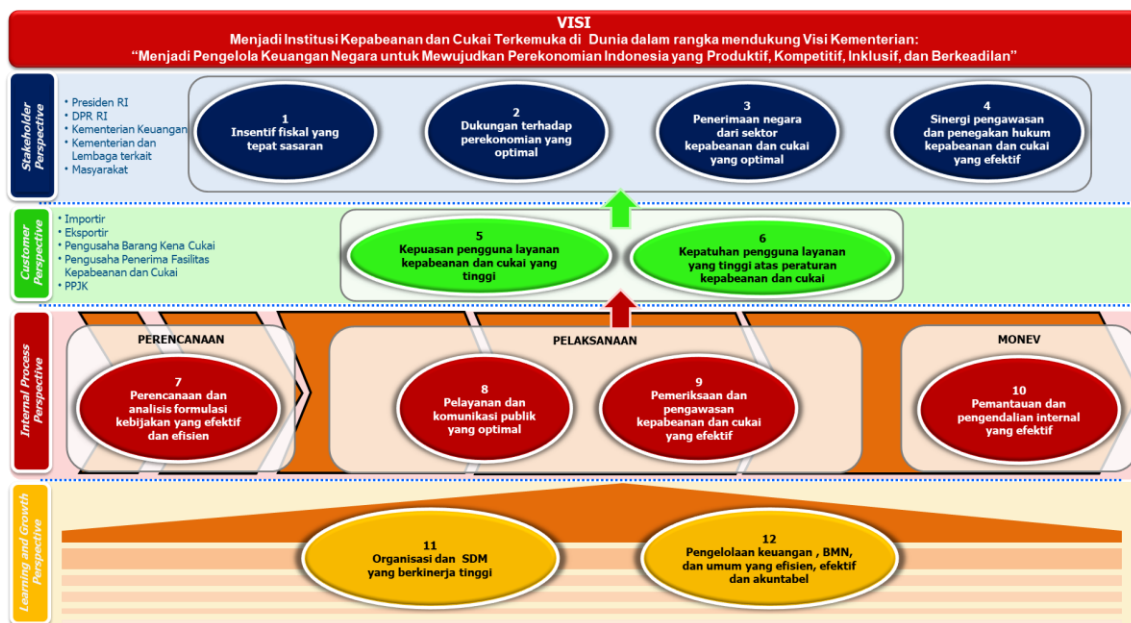
8. Lampiran.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) 2020-2024 memuat tujuan dari Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi DJBC untuk mendukung agenda pembangunan nasional serta mendukung tercapainya tujuan dari Kementerian Keuangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya serta karakteristik wilayah kerja, terdapat tiga tujuan yang ditetapkan dalam DPS yaitu: (1) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, (2) Penerimaan negara yang optimal, dan (3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, disusunlah sasaran-sasaran strategis yang harus diwujudkan dan dituangkan dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 yang menggambarkan kerangka hubungan sebab akibat keseluruhan perjalanan strategi organisasi sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi

### B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan konsep *Balanced Scorecard*, dimana sasaran-sasaran strategis yang sudah ditetapkan diukur keberhasilannya melalui suatu indikator kinerja (IKU). Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun dengan

memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-55/BC.08/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Pegawai DJBC Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Program/<br>Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                                                                             | Target      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                         | 1a-N              | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan                 | 76%         |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                | 2a-N              | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                   | 82%         |
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal            | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                        | 100%        |
| 4   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif   | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai     | 80%         |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 | 5a-N              | Indeks kepuasan pengguna jasa                                               | 3 (skala 4) |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N              | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                  | 82%         |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan | 81%         |
|     |                                                                            | 7b-N              | Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai                   | 3 (skala 4) |

| No. | Sasaran Program/<br>Kegiatan                                            | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8   | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                            | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 81 (skala 100) |
|     |                                                                         | 8b-N              | Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai                                   | 82%            |
| 9   | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif           | 9a-N              | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai             | 78%            |
|     |                                                                         | 9b-N              | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | 74,5%          |
| 10  | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                       | 10a-N             | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5%          |
|     |                                                                         | 10b-N             | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 82%            |
| 11  | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                               | 11a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 81%            |
|     |                                                                         | 11b-N             | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82%            |
| 12  | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-N             | Indeks kualitas kinerja anggaran                                                      | 100 (95,53%)   |

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 diawali dengan pelaksanaan *Refinement* IKU Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat berdasarkan Undangan Kepala Bidang Kepatuhan Internal nomor UND-27/WBC.145/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Pelaksanaan *Refinement* IKI Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.

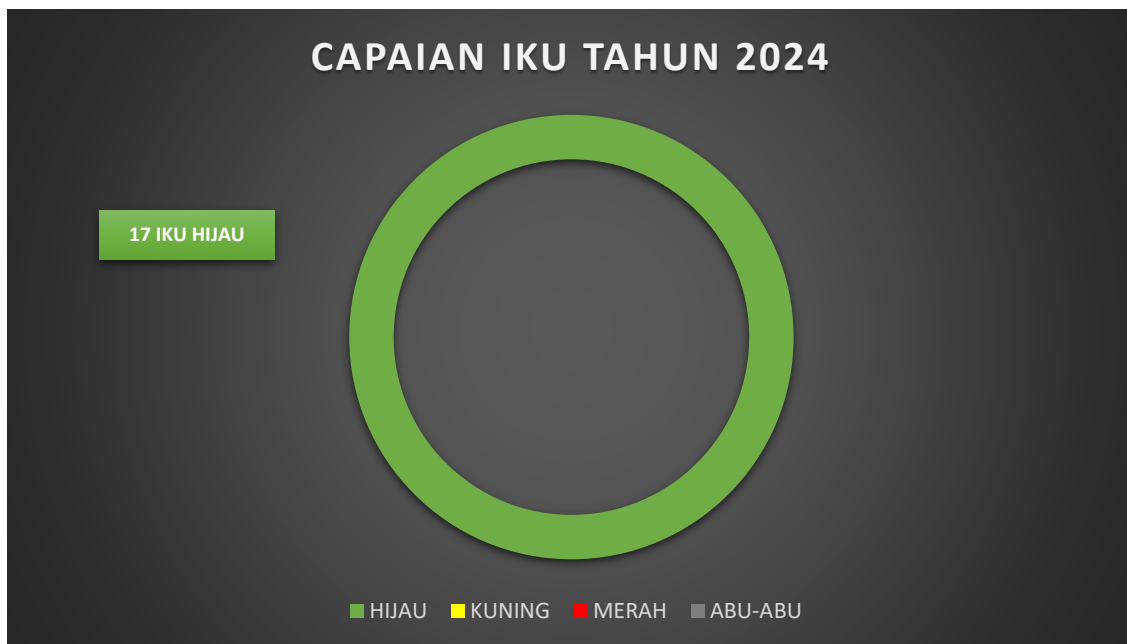
Penyusunan kinerja tahun 2025 juga memperhatikan arahan pimpinan yang disampaikan pada Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Pembahasan Isu Strategis dan Arahan Pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada 14 Januari

2024 yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Bidang, dan para Kepala KPPBC untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis satuan kerja pada tahun 2025.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2024 mencapai 118,57 naik sebesar 2,29 poin dari NKO tahun sebelumnya yang berada di angka 116,28. Capaian NKO tersebut berasal dari capaian 17 IKU yang seluruhnya dapat melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun. Rincian status capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 dapat digambarkan dengan diagram berikut:



Grafik 3.1 Status Capaian IKU Kanwil DJBC Kalbagbar

Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diperoleh berdasarkan capaian kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan nilai 115,87 (bobot 30%), *Customers Perspective* dengan nilai 120 (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan nilai 119,50 (bobot 25%), dan *Learning and Growth Perspective* dengan nilai 119,73 (bobot 25%). Rincian capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 dapat dijelaskan dengan tabel realisasi IKU sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja |                                                                             | Target            | Realisasi | Indeks |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                         | 1a-N              | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan                 | 76%               | 120%      | 120    |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                | 2a-N              | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                   | 82%               | 99,82%    | 120    |
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal            | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                        | 100%              | 103,46%   | 103,46 |
| 4   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif   | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai     | 80%               | 99,95%    | 120    |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 | 5a-N              | Indeks kepuasan pengguna jasa                                               | 3<br>(skala 4)    | 3,75      | 120    |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N              | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                  | 82%               | 100%      | 120    |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan | 81%               | 99,10%    | 120    |
|     |                                                                            | 7b-N              | Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai                   | 3<br>(skala 4)    | 3,69      | 120    |
| 8   | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                               | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                   | 81<br>(skala 100) | 98,63     | 120    |



|    |                                                                         |       |                                                                                       |               |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|    |                                                                         | 8b-N  | Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai                                    | 82%           | 100%   | 120    |
| 9  | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif            | 9a-N  | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 78%           | 95,48% | 120    |
|    |                                                                         | 9b-N  | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | 74,50%        | 88,71% | 119,07 |
| 10 | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                       | 10a-N | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,50%        | 98,80% | 116,92 |
|    |                                                                         | 10b-N | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 82%           | 100%   | 120    |
| 11 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                               | 11a-N | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 81%           | 96,33% | 118,93 |
|    |                                                                         | 11b-N | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82%           | 99,59% | 120    |
| 12 | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-N | Indeks kualitas kinerja anggaran                                                      | 100 (95,53 %) | 99,45  | 120    |

Tabel 3.1 Sasaran Program, IKU, Target, dan Realisasi

### Sasaran Strategis 1: Insentif fiskal yang tepat sasaran

| Sasaran Strategis                  | Indikator Kinerja |                                                             | Target | Realisasi | Indeks |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Insentif fiskal yang tepat sasaran | 1a-N              | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan | 76%    | 120%      | 120    |

Pemberian Insentif fiskal yang tepat sasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama “Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan” dengan target 76%.

IKU ini memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan investasi, ekspor, pengembangan industri nasional, dan peningkatan serapan tenaga kerja dari perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan. Capaian IKU ini sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 120% yang dinilai dari komponen sebagai berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KITE

Perusahaan KITE mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang terdaftar pada tahun berjalan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang aktif beroperasi.

3. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KITE Pembebasan dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,05 dengan seluruh perusahaan KITE Pembebasan yang aktif beroperasi.

4. Asistensi

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja) dan/atau 3 (rasio ekspor terhadap impor).

5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Berikut ini adalah informasi dari 3 Perusahaan KITE Pembebasan pada periode s.d. Desember 2024 di lingkungan Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagai data pendukung dari capaian IKU Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE Pembebasan:

| No. | Nama Perusahaan           | Status Perusahaan |                  | Jumlah Tenaga Kerja |     |                  |     |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----|------------------|-----|
|     |                           | Tanggal KEP       | Status           | Awal Periode*       |     | Periode Berjalan |     |
|     |                           |                   |                  | WNI                 | WNA | WNI              | WNA |
| 1   | PT BINTANG BORNEO PERSADA | Sebelum 2024      | Aktif Beroperasi | 213                 | 2   | 234              | 2   |
| 2   | PT SUMBER ALAM            | Sebelum 2024      | Aktif Beroperasi | 192                 | -   | 192              | -   |
| 3   | PT NEW KALBAR PROCESSORS  | 5 Februari 2024   | Aktif Beroperasi | 228                 | -   | 235              | -   |

Tabel 3.2 Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Selama tahun 2024 terdapat 3 perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan sebagaimana tabel di atas yang tetap beroperasi sampai dengan akhir tahun 2024. Dari sisi tenaga kerja, meskipun tidak signifikan secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan periode awal tahun.

Dari sisi rasio ekspor terhadap impor, semua perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan mencatatkan rasio di atas 1,05 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| No. | Perusahaan                | Total Impor (Rp) | Total Ekspor (Rp) | Rasio |
|-----|---------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1.  | PT BINTANG BORNEO PERSADA | 78.931.521.935   | 116.957.426.424   | 1,48  |
| 2.  | PT SUMBER ALAM            | 143.313.598.016  | 210.193.519.968   | 1,47  |
| 3.  | PT NEW KALBAR PROCESSORS  | 18.846.361.096   | 78.838.605.499    | 4,18  |

Tabel 3.3 Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Untuk memastikan tercapainya IKU ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan.

**Sasaran Strategis 2: Dukungan terhadap perekonomian yang optimal**

| Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja |                                                           | Target | Realisasi | Indeks |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Dukungan terhadap perekonomian yang optimal | 2a-N              | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor | 82%    | 99,82%    | 120    |

Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal bertujuan untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Salah satu upaya untuk mencapai Sasaran Strategis ini adalah dengan ikut melakukan pembinaan terhadap UMKM yang berada di wilayah kerja Kanwil DJBC Kalbagbar yang diukur dengan indikator “Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor”.

Target capaian IKU “Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor” tahun 2024 adalah 82% dengan realisasi IKU s.d. Desember 2024 yaitu 102,85%. Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain memberikan asistensi berkelanjutan kepada UMKM binaan dan menintensifkan pemanfaatan Klinik UMKM dan Ekspor.

Pada tahun 2024, IKU ini di-cascade ke seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Keberhasilan IKU ini diukur salah satunya dengan adanya realisasi ekspor dari UMKM binaan baik itu ekspor langsung maupun tidak langsung. Dalam periode 2024 terdapat 28 UMKM binaan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang melakukan ekspor langsung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| No. | Nama UMKM                      | Produk UMKM Ekspor                       | Satker Pembina        |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | UMKM PT Anugrah Borneo Perkasa | Mie Instan Mie Sejati Ayam Panggang / 40 | KPPBC TMP B Pontianak |

| No. | Nama UMKM                               | Produk UMKM Ekspor            | Satker Pembina        |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2   | UMKM CV Sumber Karunia                  | Coconut Cake (Bungkil Kelapa) | KPPBC TMP B Pontianak |
| 3   | UMKM Cici Winiarsih                     | Tanaman Keladi Air            | KPPBC TMP B Pontianak |
| 4   | UMKM PT Griya Caraka Era                | Daun Pisang                   | KPPBC TMP B Pontianak |
| 5   | UMKM PT Khatulistiwa Mandiri            | Buah Semangka                 | KPPBC TMP B Pontianak |
| 6   | UMKM PT Sumber Alam Permata Mandiri     | Coconut Cake (Bungkil Kelapa) | KPPBC TMP B Pontianak |
| 7   | UMKM PT Nalindo Jaya Abadi              | Alumunium Ingot               | KPPBC TMP B Pontianak |
| 8   | UMKM Syarif Muhammad Syaifudin          | Madu                          | KPPBC TMP B Pontianak |
| 9   | UMKM PT Bin Mushtaq International Impex | Buah Naga                     | KPPBC TMP B Pontianak |
| 10  | UMKM PT Makmur Kita Perkasa             | Bajakah dan Teh Oolong        | KPPBC TMP B Pontianak |
| 11  | UMKM CV Nuansa Nusantara Studio         | Peralatan Rumah Tangga        | KPPBC TMP B Pontianak |
| 12  | UMKM Rulianyah                          | Kripik Ubi, Pisang, dll.      | KPPBC TMP C Sintete   |
| 13  | UMKM CV Berkah Tunas Nusantara          | Ikan, Cumi, Udang, dll.       | KPPBC TMP C Sintete   |

| No. | Nama UMKM                      | Produk UMKM Ekspor                                                              | Satker Pembina           |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14  | UMKM Rofiqoh                   | Hasil Pertanian seperti Sayur, Buah-buahan, dan Barang Rumah Tangga Skala Kecil | KPPBC TMP C Sintete      |
| 15  | UMKM Budiman                   | Pertanian, Kerajinan Tangan dan Makan                                           | KPPBC TMP C Jagoi Babang |
| 16  | UMKM Best Friend Ekspor        | Buah-buahan dan Sayur-sayuran                                                   | KPPBC TMP C Jagoi Babang |
| 17  | UMKM Jagoi Trading Mandiri     | Buah-buahan dan Sayur-sayuran                                                   | KPPBC TMP C Jagoi Babang |
| 18  | UMKM Kumba Jaya Ekspor         | Buah-buahan dan Sayur-sayuran                                                   | KPPBC TMP C Jagoi Babang |
| 19  | UMKM Yanto                     | Kerajinan Tangan dan Aksesoris                                                  | KPPBC TMP C Jagoi Babang |
| 20  | UMKM Lili Apriani              | Buah dan Sayur                                                                  | KPPBC TMP C Nanga Badau  |
| 21  | UMKM Syaifril Anwar            | Ikan Konsumsi                                                                   | KPPBC TMP C Nanga Badau  |
| 22  | UMKM PT Mitra Arwana Indonesia | Ikan Konsumsi                                                                   | KPPBC TMP C Nanga Badau  |
| 23  | UMKM PT Bahana Alam Sakti      | Perdagangan                                                                     | KPPBC TMP C Entikong     |
| 24  | UMKM CV Jesslyn Indah Lestari  | Kelautan dan Perikanan                                                          | KPPBC TMP C Entikong     |
| 25  | UMKM PT Entikong Mandiri Jaya  | Perdagangan                                                                     | KPPBC TMP C Entikong     |

| No. | Nama UMKM                         | Produk UMKM Ekspor     | Satker Pembina       |
|-----|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 26  | UMKM PD Maju Jaya                 | Kelautan dan Perikanan | KPPBC TMP C Entikong |
| 27  | UMKM CV Usaha Fajar Abadi         | Perdagangan            | KPPBC TMP C Entikong |
| 28  | UMKM Faicheung Bird Nest Industry | Sarang Burung Walet    | KPPBC TMP C Ketapang |

Tabel 3.4 UMKM Binaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

Sedangkan data UMKM binaan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang melakukan ekspor tidak langsung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Nama UMKM                            | Produk UMKM Ekspor | Satker Pembina          |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | UMKM Tilawati                        | Lada               | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 2   | UMKM Kristoforus Heribertus Haryanto | Durian             | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 3   | UMKM Junatan                         | Lada               | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 4   | UMKM Yustina Tina                    | Lada               | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 5   | UMKM Haposan Marbun                  | Lada               | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 6   | UMKM Ahmad Sahid                     | Buah dan Sayur     | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 7   | UMKM Halimsyah                       | Lada               | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 8   | UMKM Yupianus                        | Buah dan Sayur     | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 9   | UMKM Hendri Satria                   | Buah dan Sayur     | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 10  | UMKM Armila                          | Kerajinan          | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 11  | UMKM Juli Toni                       | Buah dan Sayur     | KPPBC TMP C Nanga Badau |

| No. | Nama UMKM                                 | Produk UMKM Ekspor                     | Satker Pembina          |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 12  | UMKM Mersam La                            | Ikan Konsumsi                          | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 13  | UMKM Sinar Iban Pegari                    | Ikan Konsumsi                          | KPPBC TMP C Nanga Badau |
| 14  | UMKM Sinar Bersama Agroindo (Azy Wardana) | Arang Batok Kelapa, Kelapa Utuh, Kopra | KPPBC TMP C Ketapang    |
| 15  | UMKM CV Sinar Cahaya Mega (Suhardi)       | Arang Sekam, Cocopeat, Cocofiber       | KPPBC TMP C Ketapang    |

Tabel 3.5 UMKM Binaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang Melakukan Ekspor Tidak Langsung di 2024

### Sasaran Strategis 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

| Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja |                                                      | Target | Realisasi | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai | 100%   | 103,46%   | 103,46 |

Salah satu misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Hal ini diterjemahkan melalui sasaran strategis organisasi yaitu Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal untuk mencapai penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN maupun APBN-P. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan IKU “Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai”. Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat mengalami trend positif dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 441.645.049.000.

| Tahun | Target (Rupiah)   | Realisasi (Rupiah) | Realisasi Target |
|-------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2020  | 465.619.517.000   | 755.200.329.554    | 162,19%          |
| 2021  | 338.416.567.000   | 1.790.515.355.500  | 529,09%          |
| 2022  | 1.709.978.580.000 | 1.838.638.331.664  | 107,52%          |
| 2023  | 378.943.790.000   | 409.602.824.000    | 108,09%          |



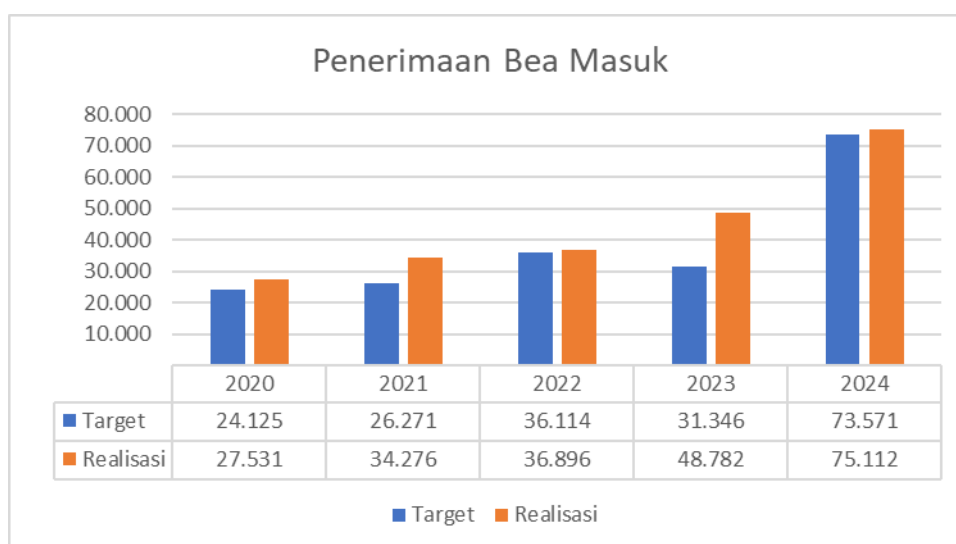
|      |                 |                 |         |
|------|-----------------|-----------------|---------|
| 2024 | 441.645.049.000 | 456.904.353.000 | 103,46% |
|------|-----------------|-----------------|---------|

Tabel 3.6 Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar

Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp. 456.904.353.000 mengalami kenaikan 11,55% atau sebesar Rp. 47.301.709.000 dari penerimaan tahun 2023. Adapun penjelasan terhadap kenaikan penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 75.111.954.000, meningkat 53,97% atau sebesar Rp 26.3229.703.000 dari penerimaan Bea Masuk tahun 2023 yaitu Rp. 48.782.251.000. Peningkatan Bea Masuk ini tercapai berkat adanya importasi Beras sebanyak 67,65 ribu Ton dan Soda Caustic sebanyak 40,80 ribu Ton. Selebihnya adalah importasi rutin di wilayah kerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Adapun lima komoditas impor penyumbang Bea Masuk terbesar adalah Beras (40,53%), Soda Caustic (12,37%), Dump Truck (3,21%), Kacang Tanah (2,84%), dan Sparepart Kendaraan Roda 2 (1,90%). Nilai Devisa Impor pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan 55,23% dibandingkan Nilai Devisa Impor pada tahun 2023, yaitu dari sebesar USD 461.494.420 pada tahun 2023 meningkat menjadi USD 691.245.377 pada tahun 2024.

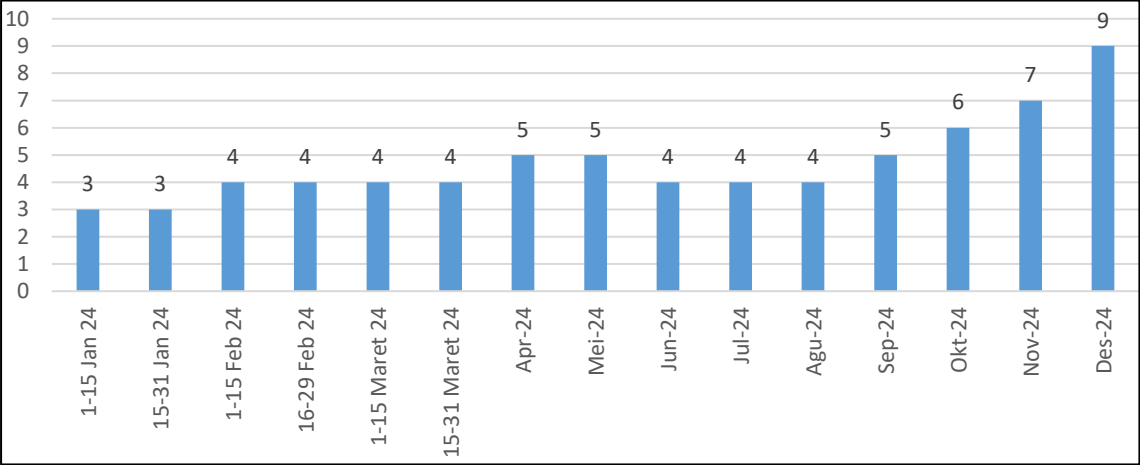


Grafik 3.2 Penerimaan Bea Masuk Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2024 (dalam juta Rupiah)

b. Penerimaan Bea Keluar

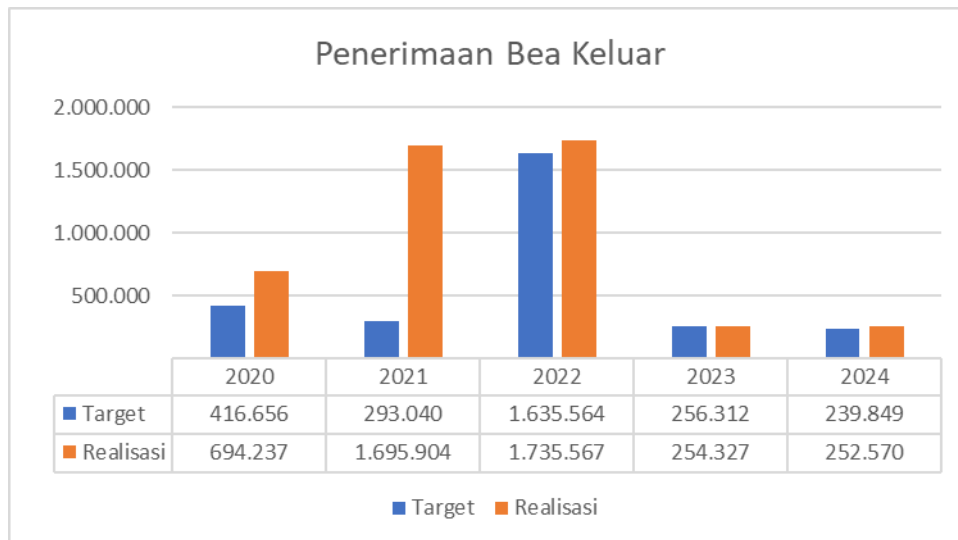
Penerimaan Bea Keluar Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 252.569.650.000, menurun 0,69% atau sebesar Rp 1.757.667.000 dari

penerimaan Bea Keluar tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 254.327.317.000. Adapun penurunan penerimaan Bea Keluar tahun 2024 disebabkan oleh fluktuasi naik turunnya harga komoditas Crude Palm Oil (CPO). Semenjak adanya larangan ekspor Bauksit pada tahun 2023, sektor CPO dan produk turunannya adalah sektor penggerak utama penerimaan Bea Keluar pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.



Grafik 3.3 Perkembangan Kolom Tarif CPO dan Produk Turunannya 2024

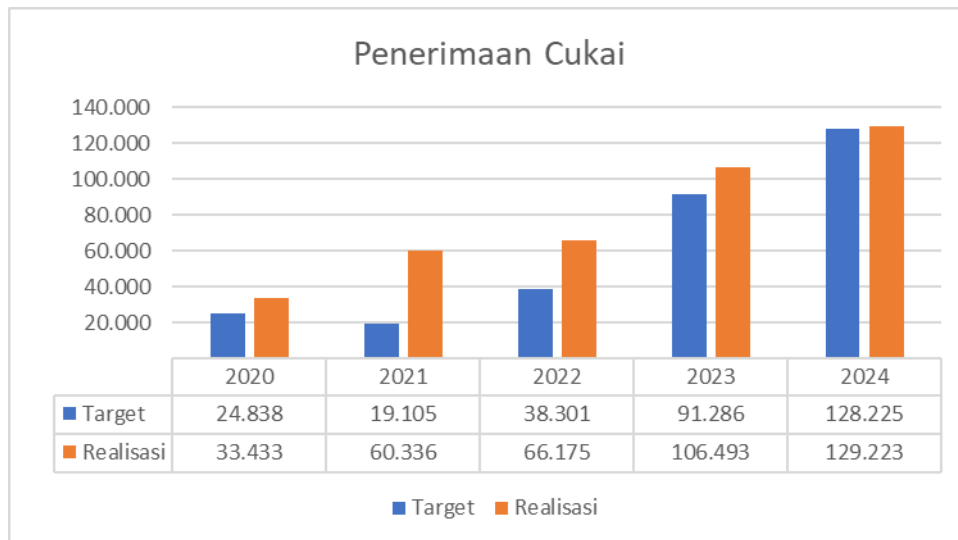
Terlihat pada tabel di atas, kolom tarif CPO dan produk turunannya pada bulan Januari s.d. Agustus 2024 berada pada kolom 3 s.d. 5, dan mulai bulan September s.d. Desember 2024 berada pada kolom 5 s.d. 9. Adapun lima komoditas ekspor penyumbang Bea Keluar terbesar adalah CPO dan produk turunannya (79,02%), Palm Kernel Expeller (10,73%), Palm Kernel Shell (7,48%), Minyak Kelapa (6,44%), dan Bio Diesel (5,64%). Nilai Devisa Ekspor pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan 0,52% dibandingkan Nilai Devisa Ekspor pada tahun 2023, yaitu dari sebesar USD 1.946.103.095 pada tahun 2023 meningkat menjadi USD 1.956.235.263 pada tahun 2024.



Grafik 3.4 Penerimaan Bea Keluar Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2024 (dalam juta Rupiah)

c. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp 129.222.749.000, meningkat 21,34% atau sebesar Rp 22.729.673.000 dari penerimaan Cukai tahun 2023 sebesar Rp 106.493.076.000. Hal ini tidak terlepas dari *extra effort* yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat sehingga menyebabkan naiknya realisasi penerimaan Cukai tahun 2024 secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan produksi BKC berupa Hasil Tembakau dari semula 683.471.520 batang pada tahun 2023 menjadi 861.927.240 batang pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat pabrik Hasil Tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Sintete, yaitu PT Borneo Twindo Group dan di wilayah pengawasan KPPBC TMP B Pontianak yaitu PT Borneo Manunggal Megah Perkasa dan PR Arwana Mas. Naiknya capaian realisasi penerimaan tahun 2024 didukung oleh pengawasan dan pemberian asistensi terhadap produsen BKC terkait ketertiban terhadap pelaporan produksi BKC sehingga meningkatkan kepatuhan dari produsen BKC



Grafik 3.5 Penerimaan Cukai Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2024 (dalam juta Rupiah)

#### Sasaran Strategis 4: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif

| Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja |                                                                          | Target | Realisasi | Indeks |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai | 80%    | 99,95%    | 120    |

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas, dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi Masyarakat, menjaga perdagangan dan industry dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Tahun 2024, target capaian IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Kepabeanaan dan Cukai” ini adalah 90% dengan realisasi 99,95%. IKU ini terdiri dari 2 sub IKU yaitu “Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” dengan target 83% dan realisasi sebesar 87% dan IKU “Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal” dengan target 84% dan realisasi 112,9%.

Jumlah penyidikan yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat periode tahun 2024 sebanyak 9 (Sembilan) kasus telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, (P-21).

Dibandingkan tahun 2023, Sub IKU “Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” tidak mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan jumlah penyidikan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) kasus dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

| PDP               | TANGGAL         | KANTOR                         | TSK        | STATUS           |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|
| PDP-01            | 19 Januari 2024 | Kanwil DJBC<br>Kalbagbar       | MRI als R  | P-21 (19 Feb'24) |
| PDP-01            | 7 Februari 2024 |                                | M          | P-21 (25 Mar'14) |
| PDP-01/<br>KHUSUS | 29 Agustus 2024 |                                | Susanto    | P-21 (24 Okt'24) |
| PDP-01/<br>KHUSUS | 2 Desember 2023 | KPPBC TMP<br>C Entikong        | Ismunandar | P-21 (26 Jan'24) |
| PDP-01/<br>KHUSUS | 21 Maret 2024   |                                | Meidianto  | P-21 (30 Apr'24) |
| PDP-01            | 7 Desember 2023 | KPPBC TMP                      | Sutrisno   | P-21 (5 Jan'24)  |
| PDP-01            | 20 Januari 2024 | B Pontianak                    | Bahari     | P-21 (18 Mar'24) |
| PDP-02/<br>KHUSUS | 2 Desember 2023 | KPPBC TMP<br>C Jagoi<br>Babang | FH         | P-21 (12 Feb'24) |
| PDP-03/<br>KHUSUS | 2 Desember 2023 |                                | Helmi      |                  |

Tabel 3.7 Penyidikan 2024

Sub IKU lainnya yaitu “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal” dengan target sebesar 80% dan realisasi mencapai 99,95%. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melaksanakan pengawasan dan/atau sosialisasi sebanyak 265 kali dengan total skor sebesar 235,25 poin. Dari seluruh pengawasan tersebut, dihasilkan Berita Acara Penegahan sebanyak 367 dengan total skor sebesar 388 poin.

| No. | Komponen Perhitungan         | 2021 | 2022   | 2023  | 2024   |
|-----|------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 1   | Poin Pelaksanaan Sosialisasi | 23,5 | 56,5   | 259,3 | 235,25 |
| 2   | Pelaksanaan Pengawasan       | 125  | 134    | 260   | 265    |
| 3   | Efektivitas                  | 119  | 129,75 | 508   | 367    |

| No. | Komponen Perhitungan     | 2021          | 2022           | 2023          | 2024          |
|-----|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|     | Pelaksanaan Pengawasan   |               |                |               |               |
| 4   | Tindak Lanjut Penindakan | 404,5         | 261,5          | 546,3         | 388           |
|     | <b>Capaian</b>           | <b>98,02%</b> | <b>100,33%</b> | <b>99,91%</b> | <b>99,95%</b> |

Tabel 3.8 Poin Komponen Perhitungan Sub IKU BKC

Realisasi Sub IKU “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal” mengalami sedikit peningkatan, hal tersebut mempengaruhi kualitas keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya total pelaksanaan pengawasan dan/atau sosialisasi yaitu sebanyak 265 kali dengan total skor sebesar 235,25 poin dan menghasilkan Berita Acara Penegahan sebanyak 367 dengan total skor sebesar 388,00 poin. Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 antara lain:

- Melakukan asistensi penyidikan dan penyelesaian tindak lanjut BHP ke KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagbar;
- Melakukan operasi penindakan BKC ilegal yang bersifat targeting;
- Melakukan kegiatan pengawasan jalur distribusi BKC;
- Melakukan monitoring di perusahaan / penyalur BKC;
- Melakukan pemutakhiran peta kerawanan pemasaran dan jalur distribusi BKC; dan
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Terhadap Capaian IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai” Bidang Penindakan dan Penyidikan tetap melakukan optimalisasi efektivitas pengawasan NPP (narkotika, psikotropika, dengan menggunakan unit anjing pelacak (K-9) serta optimalisasi efektivitas sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lain (BNN/POLRI/TNI). Atas kegiatan optimalisasi tersebut selama tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melakukan penegahan penindakan NPP yang dilakukan oleh unit K-9 maupun bersinergi dengan APH lain sebanyak 33 (tiga puluh tiga kali) dengan hasil pencapaian adalah sebagai berikut:

|                          |         |       |
|--------------------------|---------|-------|
| Jumlah BB Metamphetamine | 143,973 | Gram  |
| Jumlah BB Ganja          | 11,052  | Gram  |
| Jumlah BB Ekstasi        | 22,237  | Butir |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Jumlah BB Aprazolam       | 100 | Butir |
| Jumlah BB Misoprostol     | 7   | Butir |
| Jumlah BB Trihexyphenidyl | 110 | Butir |

Tabel 3.9 penegahan dan penindakan NPP

Berikut dokumentasi hasil penindakan:

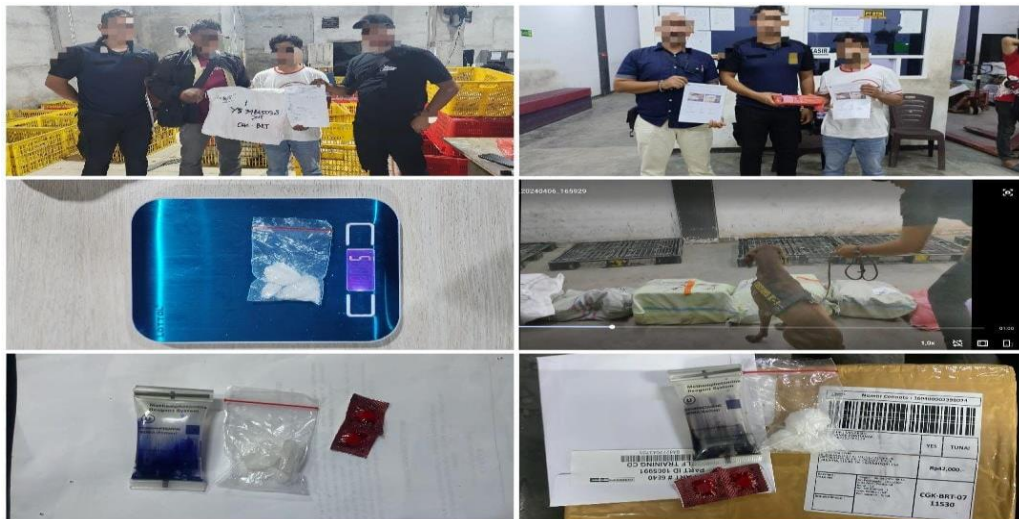
K-9 Brown & K-9 Kane berhasil mendeteksi 205 gr Methamphetamine & butir / 4 gr MDMA yang dikemas didalam paket yang berisi tas punggung/backpack di Gudang Regulated Agent Pontianak pada tanggal 29 Maret 2024



Gambar 3.1 Dokumentasi Penindakan NPP pada tanggal 29 Maret 2024

Berselang 1 minggu, K-9 Brown & K-9 Tyson kembali berhasil mendeteksi 5 gr Methamphetamine & 2 butir Happy Five yang dikemas didalam paket yang berisi pakaian di Gudang Regulated Agent Pontianak pada tanggal 06 April 2024. Paket tersebut telah melalui pemeriksaan X-Ray oleh Pihak RA sebelum dilakukan pelacakan oleh Tim K-9 dan tidak ditemukan adanya indikasi image X-Ray yang mengarah ke narkoba.





Gambar 3.2 Dokumentasi Penindakan NPP pada tanggal 06 April 2024

Kemudian Berselang 2 minggu, K-9 Brown & K-9 Sproet kembali berhasil mendeteksi 1.019 gr Methamphetamine yang dikemas didalam paket yang berisi Tali Pancing di Gudang Regulated Agent Pontianak pada tanggal 21 April 2024.



Gambar 3.3 Dokumentasi Penindakan NPP pada tanggal 21 April 2024



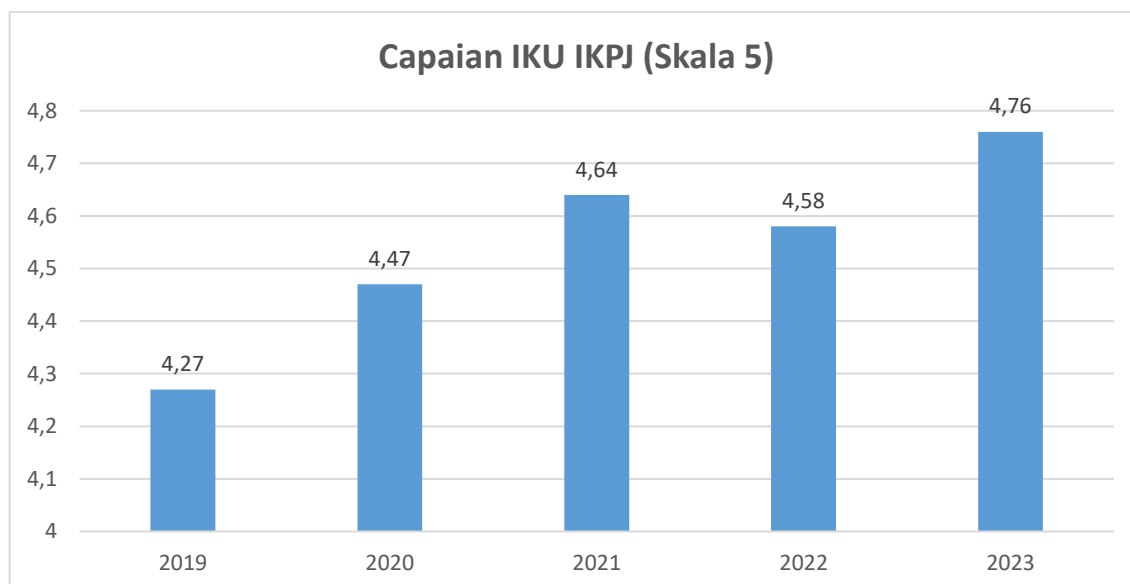
### Sasaran Strategis 5: Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

| Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja |                               | Target         | Realisasi | Indeks |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|
| Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi | 5a-N              | Indeks kepuasan pengguna jasa | 3<br>(skala 4) | 3,75      | 120    |

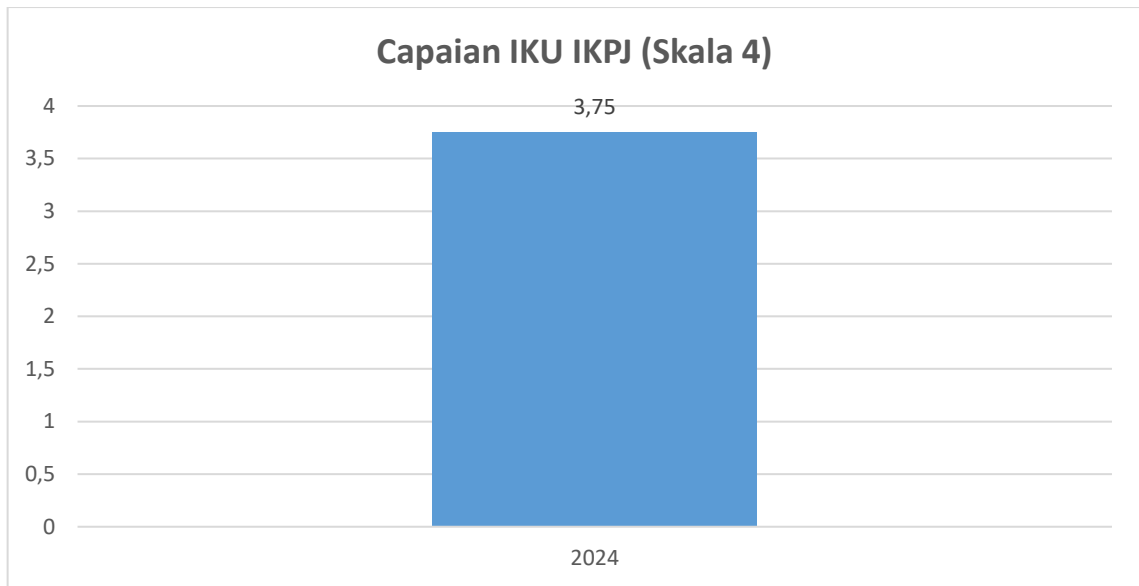
Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dikoordinasikan (dilakukan) oleh Direktorat Kepatuhan Internal untuk seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC yang memiliki layanan kepabeanan dan/atau cukai secara langsung kepada pengguna jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.



Grafik 3.6 Capaian IKU IKPJ 2019 s.d. 2023 (Skala 5)



Grafik 3.7 Capaian IKU IKPJ 2024 (Skala 4)

Pada tahun 2024, capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah 3,75 (Sangat Puas). Capaian ini didapatkan dari rata-rata capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Q2, Q3, dan Q4 serta hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ).

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2024 adalah sebagai berikut:



### Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024

|                      |       |                 |        |
|----------------------|-------|-----------------|--------|
| Jumlah Pengguna Jasa | 107   | Jenis Layanan   | Jumlah |
| Minimum Sample       | 102   | Datang          | -      |
| Jumlah Responden     | 105   | Datang & Online | 87     |
| Margin of Error      | 1,30% | Online          | 18     |

| Indikator                                  | Indeks         | Kategori           | Tren            | IPA |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----|
| <b>Sistem dan Prosedur Pelayanan</b>       | <b>: 3,691</b> | <b>Sangat Puas</b> | <b>🌟 -0,124</b> |     |
| Kejelasan Persyaratan Administrasi         | : 3,686        | Sangat Puas        | 🌟 -0,134        | II  |
| Kejelasan Prosedur Pelayanan               | : 3,695        | Sangat Puas        | 🌟 -0,115        | II  |
| Kemudahan Prosedur Pelayanan               | : 3,686        | Sangat Puas        | 🌟 -0,134        | II  |
| Kejelasan Biaya Pelayanan                  | : 3,714        | Sangat Puas        | 🌟 -0,126        | I   |
| Kecepatan Waktu Pelayanan                  | : 3,676        | Sangat Puas        | 🌟 -0,114        | II  |
| <b>Pegawai dan Petugas Pelayanan</b>       | <b>: 3,720</b> | <b>Sangat Puas</b> | <b>🌟 -0,116</b> |     |
| Keramahan dan Kesopanan Pegawai            | : 3,782        | Sangat Puas        | 🌟 -0,072        | I   |
| Kedisiplinan Pegawai                       | : 3,713        | Sangat Puas        | 🌟 -0,127        | I   |
| Kecepatan Petugas Pelayanan                | : 3,632        | Sangat Puas        | 🌟 -0,171        | II  |
| Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan | : 3,713        | Sangat Puas        | 🌟 -0,102        | I   |
| Keadilan Petugas Pelayanan                 | : 3,713        | Sangat Puas        | 🌟 -0,129        | I   |
| Integritas Pegawai                         | : 3,770        | Sangat Puas        | 🌟 -0,096        | I   |
| <b>Sarana dan Prasarana Kantor</b>         | <b>: 3,700</b> | <b>Sangat Puas</b> | <b>🌟 -0,099</b> |     |
| Kenyamanan Loker Pelayanan                 | : 3,747        | Sangat Puas        | 🌟 -0,058        | I   |
| Kebersihan Kantor                          | : 3,759        | Sangat Puas        | 🌟 -0,087        | I   |
| Kenyamanan Ruang Tunggu                    | : 3,701        | Sangat Puas        | 🌟 -0,107        | II  |
| Kenyamanan Toilet                          | : 3,667        | Sangat Puas        | 🌟 -0,100        | II  |
| Kejelasan Tata Ruang                       | : 3,690        | Sangat Puas        | 🌟 -0,128        | II  |
| Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya      | : 3,632        | Sangat Puas        | 🌟 -0,113        | II  |
| <b>Layanan Informasi</b>                   | <b>: 3,731</b> | <b>Sangat Puas</b> | <b>🌟 -0,099</b> |     |
| Ketersediaan Layanan Informasi             | : 3,752        | Sangat Puas        | 🌟 -0,088        | I   |
| Kejelasan Layanan Informasi                | : 3,724        | Sangat Puas        | 🌟 -0,106        | I   |
| Kemudahan Mendapatkan Informasi            | : 3,714        | Sangat Puas        | 🌟 -0,126        | I   |
| Kemudahan Menyampaikan Pengaduan           | : 3,733        | Sangat Puas        | 🌟 -0,077        | IV  |
| <b>Indeks Kepuasan</b>                     | <b>: 3,712</b> | <b>Sangat Puas</b> | <b>🌟 -0,110</b> |     |
| Faktor Koreksi                             | : 0,000        |                    | 🌟 -0,020        |     |
| <b>Indeks Akhir</b>                        | <b>: 3,712</b> | <b>Sangat Puas</b> | <b>🌟 -0,100</b> |     |

Grafik 3.8 Hasil SKPJ Tahun 2024

Dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah:

| Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 |      |
|---------------------------------------------|------|
| Q2                                          | 3,8  |
| Q3                                          | 3,81 |
| Q4                                          | 3,82 |

Grafik 3.9 Hasil SKM Tahun 2024

Dari empat variabel yang dinilai pada Survei Kepuasan Pengguna Jasa, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Layanan Informasi yaitu sebesar 3,731, sedangkan variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Sistem dan Prosedur Layanan yaitu sebesar 3,691. Pada tahun 2024, terdapat perubahan pada indeks penilaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari indeks 5 pada tahun sebelumnya menjadi indeks 4.

**Sasaran Strategis 6: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**

| Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja |                                            | Target | Realisasi | Indeks |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N              | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai | 82%    | 100%      | 120    |

Sasaran yang ingin dicapai pada SS ini adalah tingkat ketaan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai. Indikator yang digunakan pada SS ini adalah “Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai”.

Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan sesuai perhitungan Manual IKU pada Tahun 2024 adalah 100% dengan total target penyelesaian piutang lancar sebesar Rp. 49.278.661.526,00 dan realisasi penyelesaian piutang lancar sebesar Rp. 49.278.661.526,00 serta total target penyelesaian piutang macet sebesar Rp. 0,00

Realisasi tersebut disebabkan oleh formula IKU sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $[90\% \times \text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar} / \text{Jumlah Piutang Lancar}] +$ $[10\% \times \text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet} / \text{Jumlah Piutang Macet}]$ <p>*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka bobot komponen piutang lancar menjadi 100%</p> |

Adapun capaian persentase piutang sesuai perhitungan Manual IKU menjadi 100% pada Tahun 2024 adalah dengan dikeluarkannya piutang sebesar Rp. 2.782.886.445,00 dari total target dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang belum jatuh tempo sebesar Rp. 2.782.886.445,00 yang terdiri atas:

- SPSA Nomor SPSA-02/WBC.14/2024 tanggal 28 November 2024 a.n. Borneo Alumina Indonesia sebesar Rp. 25.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2025;
- SPKTNP Nomor SPKTNP-02/BC/WBC.14/2024 tanggal 28 November 2024 a.n. Borneo Alumina Indonesia sebesar Rp. 318.533.096,00 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2025;
- SPP Nomor SPP-01/WBC.14/2024 tanggal 28 November 2024 a.n. Borneo Alumina Indonesia sebesar Rp. 269.417.786,00 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2025;
- SPP Nomor SPP-02/WBC.14/2024 tanggal 28 November 2024 a.n. Borneo Alumina Indonesia sebesar Rp. 1.567.825.357,00 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2025;
- SPP Nomor SPP-35/WBC.02/2024 tanggal 29 November 2024 a.n. PT. AKR Corporindo TBK sebesar Rp. 25.360.819,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025;
- SPP Nomor SPP-36/WBC.02/2024 tanggal 29 November 2024 a.n. PT. AKR Corporindo TBK sebesar Rp. 1.275.125,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025;
- KEP Dirjen Keberatan Nomor KEP-00003/BC/WBC.14/KBT/2024 tanggal 23 Desember 2024 a.n. PT. Pacific Bio Industry sebesar Rp. 189.874.262,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2025;
- SPSA Nomor 000003/KBC.1401/2024 tanggal 4 Desember 2024 a.n. PT. Tirta Permai Bahari sebesar Rp. 25.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000004/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000005/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000006/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000007/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;

- SPPBK Nomor 000008/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000009/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000010/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000011/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000012/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000013/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000014/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000015/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000016/KBC.1401/54/2024 tanggal 6 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025;
- SPPBK Nomor 000017/KBC.1401/54/2024 tanggal 7 Desember 2024 a.n. Wilmar Cahaya Indonesia TBK sebesar Rp. 25.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2025;
- SPSA Nomor 000004/KBC.1401/2024 tanggal 11 Desember 2024 a.n. Samudera Agencies Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2025.

b. Tidak terdapat piutang sudah jatuh tempo pada Tahun 2024.

Beberapa kendala penyelesaian piutang Bea dan Cukai diantaranya piutang macet yang telah dilimpahkan wewenang penagihannya kepada KPKNL yang mempunyai umur piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun belum dapat ditagih dikarenakan alamat perusahaan tidak ditemukan serta data pendukung penagihan yang tidak lengkap.

Upaya penyelesaian piutang macet tersebut adalah dengan sudah diusulkannya Penghapusbukuan pada Tahun 2024 dan akan diusulkan Penghapustagihan pada Tahun 2025 dengan berpedoman pada PMK Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Upaya penyelesaian realisasi piutang Bea dan Cukai antara lain dengan melakukan optimalisasi penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dan evaluasi laporan piutang, dan asistensi penanganan penyelesaian piutang kepada satker vertikal di wilayah Kalimantan Bagian Barat.

#### Sasaran Strategis 7: Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

| Sasaran Strategis                                                     | Indikator Kinerja |                                                                             | Target         | Realisasi | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan | 81%            | 99,10%    | 120    |
|                                                                       | 7b-N              | Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai                   | 3<br>(skala 4) | 3,69      | 120    |

Sasaran Strategis Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien bertujuan untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), sehingga perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Terdapat 2 indikator kinerja pada SS ini yaitu **IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan”** dan **IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai”**

Pada IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan”, perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan. Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan Program

Kerja Mandiri (PKM). Kanwil DJBC Kalbagbar memiliki 30 program dengan rincian 7 Program *cascade* dan 23 Program Kerja Mandiri. Seluruh program tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan target masing-masing program. Target IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan” pada tahun 2024 adalah 81% dengan realisasi 99,10%.

IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai” memiliki target 3 dengan capaian sebesar 3,69 dengan judul kajian “Penerapan dan Implikasi PMK 52/PMK.04/2019 terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat”. Capaian IKU ini dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

| No. | Tahun | Judul Kajian                                                                                                                                                                                                                           | Target | Realisasi |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1.  | 2020  | Upaya Kanwil DJBC Kalbagbar Untuk Mengawasi Peredaran Produk Kelapa Sawit Asal Provinsi Kalimantan Barat Melalui Pemberian Fasilitas Kepabeanaan                                                                                       | 3      | 3,72      |
| 2.  | 2021  | Upaya Kanwil DJBC Kalbagbar Dalam Mengoptimalkan PLB Bahan Pokok Di Badau                                                                                                                                                              | 3,1    | 3,8       |
| 3.  | 2022  | Upaya Kanwil DJBC Kalbagbar Mewujudkan Pelabuhan Kijing sebagai Hub Port SDA Kalimantan Barat                                                                                                                                          | 3,2    | 3,63      |
| 4.  | 2023  | Optimalisasi Joint Program Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar dan Kanwil DJP Kalbar Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Industri Bauksit                                                                      | 3,2    | 3,63      |
| 5.  | 2024  | Optimalisasi Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019 Terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor di Wilayah Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat (Studi Kasus: KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong) | 3      | 3,69      |

Tabel 3.10 Kajian Pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat 2020 s.d. 2024

#### Sasaran Strategis 8: Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |                    | Target | Realisasi | Indeks |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| Pelayanan dan     | 8a-N              | Indeks efektivitas | 81     | 98,63     | 120    |



|                                |      |                                                    |             |      |     |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| komunikasi publik yang optimal |      | komunikasi dan edukasi                             | (skala 100) |      |     |
|                                | 8b-N | Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai | 82%         | 100% | 120 |

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Pada Sasaran Strategis ini terdapat IKU **“Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi”** dan IKU **“Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”**. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Target capaian IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” adalah indeks 80 dari skala 100 dengan Capaian IKU pada tahun 2024 adalah 98,63. Penilaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi tersebut berdasarkan pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC. Variabel yang diukur terdiri dari Acara, Materi, dan Narasumber yang dinilai berdasarkan hasil kuisioner.

Pada IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”, IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Apabila terdapat layanan kepabeanan dan cukai yang melewati batas waktu janji layanan dapat mengakibatkan adanya rasa tidak puas yang dialami oleh pengguna jasa sehingga IKU tersebut tidak dapat terealisasi dengan optimal. Namun, pada tahun 2024, capaian IKU tersebut adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 82%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT New Kalbar Processors (KEP-1/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 5 Februari 2024);
2. Persetujuan atas BCLKT.01 KITE kepada PT New Kalbar Processors, PT Bintang Borneo Persada dan PT Sumber Alam;

3. Perpanjangan Penetapan Kawasan di Tempat Lain sebagai Tempat Penimbunan Sementara a.n. PT Banok Indah Lestari (KEP-2/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 10 Juli 2024);
4. Pencabutan Izin Penyelenggara Sekaligus Izin Pengusaha Pusat Pusat Logistik Berikat kepada PT Tribuana Tunggal Sakti (KEP-3/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 17 Juli 2024);
5. Penetapan Tempat sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat Kepada PT Surya Inti Primakarya (KEP-4/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 19 Agustus 2024);
6. Persetujuan Perubahan Data Izin Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat Energi Unggul Persada (KEP-5/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 27 Agustus 2024)
7. Pencabutan Izin Penyelenggara Sekaligus Izin Pengusaha Pusat Pusat Logistik Berikat kepada PT Export Import Sanggau Jaya (KEP-6/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 3 Oktober 2024)
8. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT Sumber Alam (KEP-7/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 7 November 2024)
9. Perubahan Keenam Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Energi Unggul Persada (KEP-8/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 22 November 2024)
10. Pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat kepada PT Surya Inti Primakarya (KEP- 9/KM.4/WBC.14/2024 tanggal 10 Desember 2024).

#### Sasaran Strategis 9: Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

| Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja |                                                                          | Target | Realisasi | Indeks |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif | 9a-N              | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai | 78%    | 95,48%    | 120    |
|                                                              | 9b-N              | Persentase efektivitas patroli laut                                      | 74,50% | 88,71%    | 119,07 |

Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang

kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. **Pada Sasaran Strategis ini, terdapat IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai" dan IKU "Persentase efektivitas patroli laut".**

Tahun 2024, target **IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai"** adalah 78% dengan realisasi 95,48%. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2024 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Total 105 SBP (Surat Bukti Penindakan) yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan KPPBC yang berada di wilayah pengawasannya selama tahun 2024. Sebanyak 105 SBP telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyidikan TPA: 0 SBP;
- b. Penyidikan TPA P-21: 4 SBP;
- c. Penghentian penyidikan dlm rangka UR: 13 SBP;
- d. Penelitian UR: 51 SBP;
- e. Sanksi Administrasi: 13 SBP;
- f. Perubahan Klasifikasi Pos Tarif = 0 SBP;
- g. Penyerahan izin lartas = 0 SBP;
- h. Penetapan BMN: 252 SBP;
- i. Reekspor: 0 SBP;
- j. Pelimpahan ke Instansi Lain: 49 SBP;
- k. Penetapan BDN: 112 SBP;
- l. Pemusnahan BKC: 0 SBP; dan
- m. Tidak Ditemukan Pelanggaran = 151 SBP.

Adapun realisasi kinerja IKU ini dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| Komponen Perhitungan            | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pelaksanaan patroli             | 263           | 300           | 208           | 209           |
| Efektivitas pelaksanaan patroli | 231,05        | 251,2         | 178,7         | 187,25        |
| Tindak lanjut patroli           | 798,3         | 539,1         | 810,9         | 534,20        |
| <b>Realisasi</b>                | <b>92,72%</b> | <b>92,49%</b> | <b>97,72%</b> | <b>95,48%</b> |

Tabel 3.11 Realisasi IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai"

Dibandingkan tahun 2023, IKU “Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai” realisasinya mengalami penurunan, namun dalam hal pelaksanaan patroli bertambah kegiatannya sepanjang tahun 2024. Kegiatan patroli dan operasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 banyak menghasilkan penegahan sehingga skor tindak lanjut patroli juga semakin meningkat.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 yakni memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan melakukan operasi penindakan yang bersifat targeting dan melakukan koordinasi dengan APH terkait untuk melakukan operasi bersama.

Tahun 2024, target capaian IKU “Persentase efektivitas patroli laut” adalah 74,5% dengan realisasi 88,71%. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 81,12%. IKU “Persentase efektivitas patroli laut” diukur dari 4 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%);
- b. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%);
- c. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%); dan
- d. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%).

Patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk selanjutnya disebut sebagai Patroli Laut adalah patroli yang dilaksanakan Satuan Tugas Bea dan Cukai di laut dan/atau di sungai dalam rangka melaksanakan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak negara dan dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta tujuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah perairan dalam Daerah Pabeian. Rencana patroli laut tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat sebanyak 30 kali, dengan rincian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Jumlah pelaksanaan patroli laut s.d Desember 2024: 41
- b. Jumlah poin pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut: 49,6
- c. Jumlah poin pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan yang menghasilkan penegahan/penyegelan dalam Rangka Pengamanan: 27
- d. Jumlah poin pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting: 14

Adapun realisasi IKU ini dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| Komponen Perhitungan                      | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pelaksanaan Patroli                       | 36            | 33            | 33            | 41            |
| Patroli menghasilkan pemeriksaan          | 33            | 33            | 32            | 49,6          |
| Patroli menghasilkan penegahan/penyegelan | 32            | 14            | 9,2           | 27            |
| Patroli menghasilkan penegahan            | 8             | 7             | 8             | 14            |
| <b>Realisasi</b>                          | <b>98,62%</b> | <b>82,42%</b> | <b>81,12%</b> | <b>88,71%</b> |

Tabel 3.12 Realisasi IKU “Persentase efektivitas patroli laut”

Dibandingkan tahun 2023, realisasi IKU “Persentase efektivitas patroli laut” mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya jumlah patroli laut yang menghasilkan pemeriksaan, jumlah patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegelan dan jumlah patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targetting. Upaya yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 yakni menambah frekuensi patroli yang menghasilkan penindakan dengan analisis serta memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan melakukan operasi penindakan yang bersifat *targetting* dalam kegiatan patroli laut yang dilaksanakan.

#### Sasaran Strategis 10: Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

| Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target | Realisasi | Indeks |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif | 10a-N             | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,50% | 98,8%     | 116,92 |
|                                                   | 10b-N             | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 82%    | 100%      | 120    |

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Terdapat 2 indikator

kinerja pada Sasaran Strategis ini yaitu **IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional" dan IKU "Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal"**.

IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional" bertujuan agar rekomendasi dari aparat pengawas fungsional (APF) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan dengan optimal. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-5/BC.08/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional Kanwil DJBC Kalbagbar berada di angka 98,80% dari target 84,5%. Capaian tersebut berasal dari tindak lanjut rekomendasi APF untuk Kanwil DJBC Kalbagbar beserta satker di bawahnya yang berjumlah 25 rekomendasi dengan 24 diantaranya sudah dinyatakan tuntas.

IKU berikutnya yaitu "Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal" dengan target 82% dan capaian sampai akhir tahun mencapai 100%. IKU ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- 1) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- 3) Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
- 4) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; dan
- 5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

Pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) pengaduan melalui aplikasi SIPUMA yang semuanya telah diselesaikan. Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) telah dilaksanakan pada proses bisnis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanaan pada Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai dengan menghasilkan 2 rekomendasi yang semuanya telah diselesaikan. Pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP C Sintete dan Bidang Penindakan dan Penyidikan, yang menghasilkan 5 rekomendasi secara keseluruhan dan telah ditindaklanjuti semuanya oleh evaluee.

**Sasaran Strategis 11: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja |            | Target | Realisasi | Indeks |
|--------------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|
| Organisasi dan SDM | 11a-N             | Persentase | 81%    | 96,33%    | 118,93 |

|                        |       |                                             |     |        |     |
|------------------------|-------|---------------------------------------------|-----|--------|-----|
| yang berkinerja tinggi |       | peningkatan kompetensi pegawai              |     |        |     |
|                        | 11b-N | Persentase efektivitas manajemen organisasi | 82% | 99,59% | 120 |

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi terdiri dari **IKU "Persentase peningkatan kompetensi pegawai"** dan **IKU "Persentase efektivitas manajemen organisasi"**.

Target IKI "Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai" pada tahun 2024 sebesar 80% dengan realisasi mencapai 97,78%. IKI ini memiliki tiga komponen penilaian yakni efektivitas kegiatan PKP, pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan, dan tingkat implementasi Learning Organization, dengan formula sebagai berikut:

#### Formula:

##### 1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

##### 2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat struktural yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

##### 3. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil } self \text{ assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Target**}} \times 100\%$$

\*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

**\*\*)** Target = 80

**Realisasi IKU:**

$$(\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%)$$

\*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 60\%) + (\text{Realisasi 2} \times 40\%)$$

Pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai bagi Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan rata – rata efektifitas 96,90% dan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Triwulan | Bulan Pelaksanaan | Bagian/Bidang               | Tema                                                      |
|----|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | T1       | Februari          | Bagian Umum                 | PMK 221 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja                  |
| 2. |          | Februari          | Bidang Kepatuhan Internal   | Pelaporan LHKPN dan LHKASN dan SPT Tahunan                |
| 3. |          | Maret             | Bidang Kepatuhan Internal   | Sikap Dasar, Budaya Organisasi, dan Bijak Bermedia Sosial |
| 4. | T2       | Mei               | Bidang Kepatuhan Internal   | Manajemen Kinerja                                         |
| 5. |          | Juni              | Bagian Umum                 | Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP) dan Aplikasi SINI-Jak    |
| 6. | T3       | Agustus           | Bidang Kepabeanan dan Cukai | World Customs Organization (WCO)                          |
| 7. | T4       | November          | Bidang Kepatuhan Internal   | Manajemen Kinerja (IKI Berkualitas)                       |

Tabel 3.13 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024



Pada tahun 2024 seluruh pejabat struktural pada Kanwil DJBC Kalbagbar telah memenuhi standar kompetensi jabatan (SKJ) sehingga capaian untuk komponen ini mencapai 100%. Sedangkan untuk komponen Tingkat Implementasi Learning Organization (LO), pada tahun 2024 didapat nilai hasil *self assessment* sebesar 90,95 dan nilai hasil survei sebesar 96,82. Dari nilai tersebut didapatkan nilai hasil akhir pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization* pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 sebesar 93,89%.

IKU lainnya pada SS Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi adalah “Persentase Efektifitas Manajemen Organisasi” dengan target 82% dan capaian pada akhir tahun berada di angka 99,59%. IKU ini terdiri dari 2 subIKU yaitu Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko.

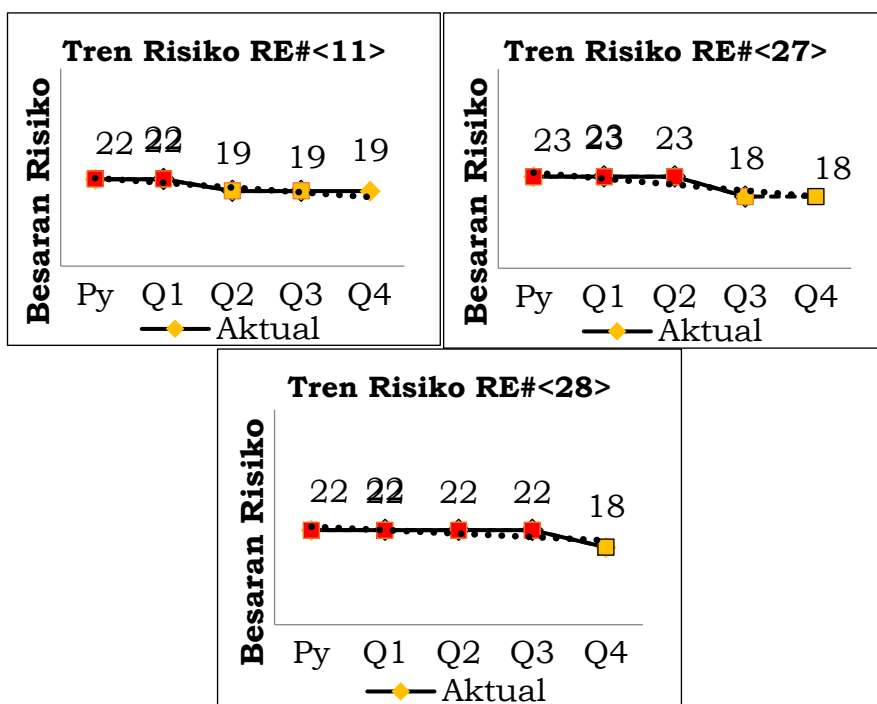
Target sub IKU “Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi” tahun 2024 adalah 83% dengan capaian akhir tahun sebesar 99,18%. Komponen perhitungan subIKU ini terdiri dari Pelaksanaan DKO, Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO, dan Kualitas Dokumen Capaian Kinerja. Selama tahun 2024, DKO telah dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan DKO dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan DJBC. Pada tahun 2024 terdapat 40 arahan pimpinan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Nilai Kualitas Dokumen Capaian Kinerja periode s.d. September 2024 adalah 97,94% yang menjadi salah satu komponen perhitungan capaian subIKU “Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi” pada tahun 2024.

Sub IKU Persentase efektivitas implelementasi Manajemen Risiko mempunyai target sebesar 81% dengan realisasi 100%. Sementara Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) menunjukan nilai 4.835 (risk enabled). Pada Tahun 2024 terdapat 3 Highlight Risk Event dengan Mitigasi Risiko yang telah dilaksanakan sejumlah 39 kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

| No          | Highlight Risk Event                                                      | Mitigasi Risiko                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RE<br>#<11> | Penyelundupan barang impor dan/atau ekspor melalui jalur perbatasan darat | 13 Patroli Darat                                                       |
| RE<br>#<27> | Peningkatan pelanggaran pengguna jasa kepabeanan dan cukai                | 13 patroli pengawasan Kepabeanan dan Cukai di wilayah perbatasan Darat |
| RE<br>#<28> | BKC HT ilegal yang tidak menggunakan pita cukai beredar di Kalbar         | 13 Operasi Pasar BKC HT                                                |

Tabel 3.14 Highlight Risk Event

Tiga Kegiatan Mitigasi Risiko diatas telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV. Hal tersebut berdampak pada 3 *Highlight Risk Event* yang semuanya mengalami penurunan tren risiko sebagaimana grafik dibawah ini:



Grafik 3.10 *Highlight Risk Event*

**Sasaran Strategis 12: Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel**

| Sasaran Strategis                                                       | Indikator Kinerja |                                  | Target          | Realisasi | Indeks |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-N             | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100<br>(95,53%) | 99,45     | 120    |

Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel diwujudkan dengan:

- mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;
- mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan

- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis tersebut adalah IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Kinerja atas perencanaan anggaran diukur sebagai berikut:
  1. Efektivitas penggunaan anggaran, Pasal 246 Ayat (4) dan (6). Ukuran efektivitas penggunaan anggaran meliputi:
    - a. Capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.
    - b. Capaian indikator kinerja program.
    - c. Capaian indikator kinerja sasaran strategis.
  2. Efisiensi penggunaan anggaran, Pasal 246 Ayat (4) dan (7). Ukuran efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.
- Kinerja atas pelaksanaan anggaran diukur sebagai berikut:
  1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (2). Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (3). Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
  3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (4). Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Target capaian IKU “ Indeks kualitas kinerja anggaran” tahun 2024 adalah sebesar sebesar 95,53% dengan realisasi Capaian IKI ini pada Tahun 2024 sebesar 99,45% yang diperoleh dari komponen berikut:

- a. 50% Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran realisasi 98,90% dengan rincian:

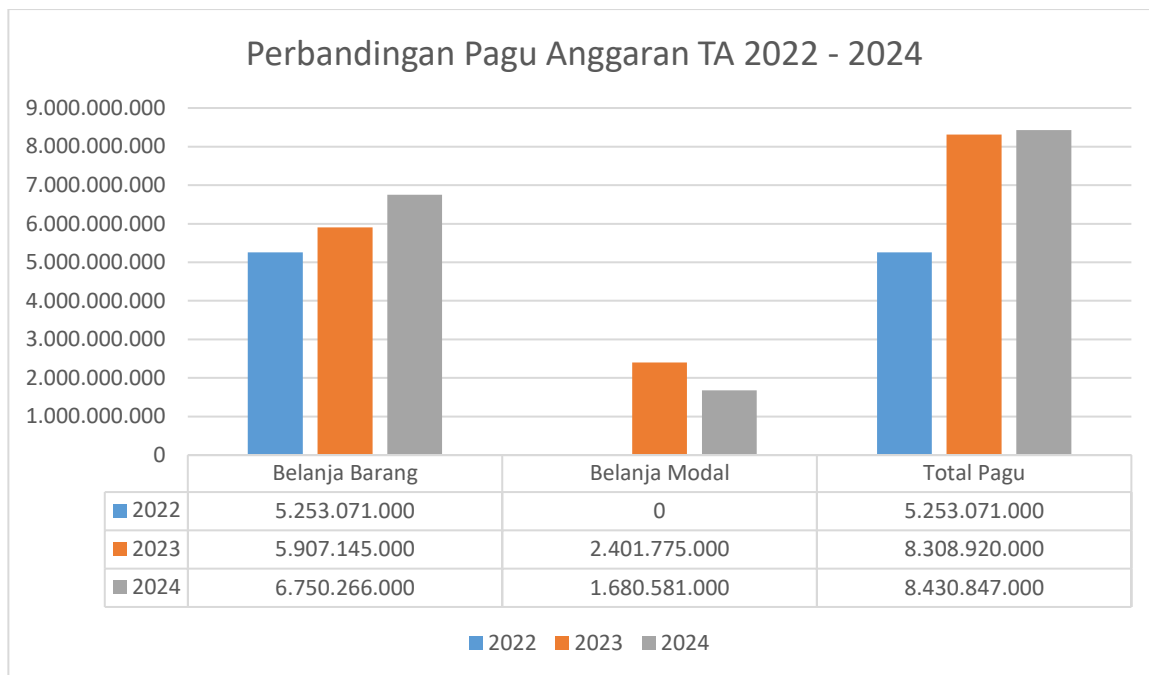
1. Realisasi Revisi DIPA 100%
  2. Realisasi Deviasi Halaman III DIPA 100%
  3. Realisasi Penyerapan Anggaran 95,41%
  4. Realisasi belanja kontraktual 100%
  5. Realisasi penyelesaian tagihan 100%
  6. Realisasi pengelolaan UP dan TUP 98.20%
  7. Realisasi dispensasi SPM 100%, dan
  8. Realisasi capaian output 100%
- b. 50% Nilai Perencanaan Anggaran dengan realisasi 100% dengan rincian:
1. Realisasi indikator Efektivitas 100%
  2. Realisasi indikator Efisiensi 100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah anggaran. Anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang menjadi dasar dalam pengelolaan maupun pelaksanaan belanja anggaran adalah Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Untuk Tahun Anggaran 2024, nama Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pelaksanaan anggaran adalah Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA) dengan komposisi penilaian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). Pada TA 2024, nilai IKPA yang berhasil dicapai oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah 98,90% dan nilai NKPA sebesar 100% sehingga capaian Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 99,45%.

Pagu anggaran pada TA 2024 yang dimiliki oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah sebesar Rp8.430.847.000,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan komposisi Belanja Barang sebesar Rp6.750.266.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp1.680.581.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Nilai pagu anggaran TA 2024 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian memiliki tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya akibat dari meningkatnya intensitas kegiatan yang ada pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

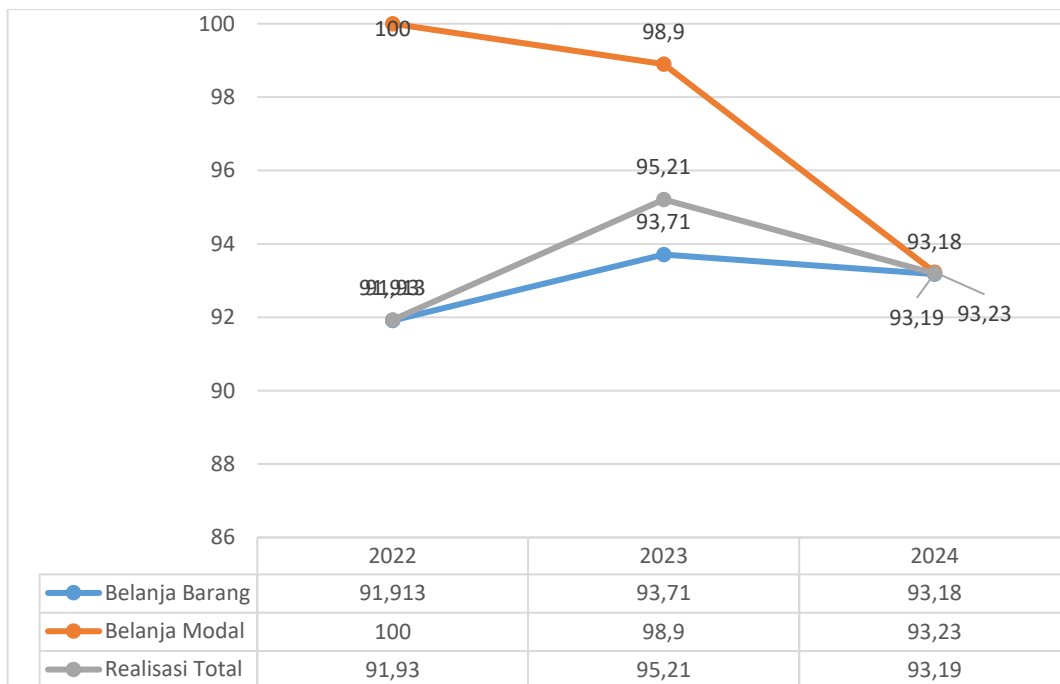


Grafik 3.11 Perbandingan Pagu Anggaran TA 2022 - 2024

Besar realisasi anggaran TA 2024 menurut data Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.856.444.228,- atau 93,19% dari total Pagu Anggaran yang ada pada DIPA Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Namun sebenarnya nilai persentase riil realisasi lebih tinggi atau sebesar 94.3% karena terdapat *blocking* pagu sebesar Rp95.946.000,- pada pagu belanja barang khususnya akun Belanja Perjalanan Dinas sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait alokasi peghematan anggaran.

| Tahun | Total Pagu    | Total Realisasi | Realisasi Belanja Barang | Realisasi Belanja Modal |
|-------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 2022  | 5.253.071.000 | 4.829.304.573   | 4.829.304.573            | -                       |
| 2023  | 8.308.920.000 | 7.910.832.606   | 5.535.468.888            | 2.375.363.718           |
| 2024  | 8.430.847.000 | 7,856,444,228   | 6,289,655,697            | 1,566,788,531           |

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran TA 2022 s.d. 2024



Grafik 3.12 Penyerapan Anggaran TA 2022 s.d. 2024

Penurunan penyerapan anggaran pada TA 2024 salah satunya disebabkan oleh perubahan arah kebijakan pemerintah yaitu terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1023/MK.02/202 tanggal 07 November 2024 perihal Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian.Lembaga TA 2024 serta adanya sisa dari pelaksanaan belanja modal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan optimalisasi.

### C. KINERJA LAINNYA

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat memiliki capaian-capaian organisasi selama 2024 baik kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak diukur dalam BSC serta achievement, inovasi, maupun penghargaan yang didapatkan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, di antaranya:

#### 1. Prestasi, Penghargaan, dan Apresiasi pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat mendapatkan prestasi, penghargaan, dan apresiasi sebagai berikut:

- Penghargaan atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan Pameran Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara;
- Penghargaan atas kerja sama mendukung program Kementerian Hukum dan HAM RI.



Gambar 3.4 Piagam Penghargaan

## 2. Dukungan Terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah )

Berbagai komitmen telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, salah satunya adalah menetapkan kinerja UMKM menjadi bagian Indikator Kinerja Utama seluruh KPPBC di Kalimantan Barat. Progres kegiatan yang dilakukan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta diberikan penguatan oleh pimpinan. Upaya ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya adalah dari Wakil Menteri Keuangan dan kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang hadir langsung mendukung. Sejak tahun 2022, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah berhasil memberikan asistensi kepada UMKM sehingga mereka berhasil mengeksport komoditi ke Malaysia. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) UMKM Kemenkeu-Satu di Kalimantan Barat. Beberapa program yang telah dijalankan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM adalah Sosialisasi Pemberdayaan UMKM di Perbatasan, Sosialisasi

dan Expo UMKM Week 2024, Sinergi Program Pengembangan dan Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat, serta Joint Program UMKM Kemenkeu-Satu Kalimantan Barat.

### **3. Inovasi yang Dilakukan Unit Kerja**

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat terus melakukan inovasi guna mempermudah dalam melakukan pelaksanaan tugas dan dalam rangka mendukung akselerasi terciptanya lingkungan yang memiliki ciri khas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, kami berusaha menciptakan inovasi-inovasi untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi. Berikut merupakan inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan telah dimasukkan ke dalam katalog inovasi Kemenkeu:

#### **a. Aplikasi Monitoring Rencana Kerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat (SiNi-JaK)**

Aplikasi Monitoring Rencana Kerja Kanwil DJBC Kalbagbar (SiNi-JaK) ini terkait dengan kategori salah satu tugas Subagian Tata Usaha dan Keuangan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat berjalan dengan baik. Aplikasi Monitoring Rencana Kerja Kanwil DJBC Kalbagbar (SiNi-JaK) berdampak positif dalam hal penggunaan anggaran agar lebih efisien sehingga berdampak dan tepat guna terhadap output, aplikasi ini juga efektif karena mampu memonitor dan mengevaluasi rencana penarikan dana dari bidang-bidang setiap bulannya sehingga PKPA sesuai dengan target yang telah ditetapkan."

#### **b. SIPPATUH (Sistem Pencegahan Pemberantasan Korupsi bagi Pegawai dan Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jasa)**

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dianggap perlu untuk menciptakan terobosan baru dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang semakin produktif dan berintegritas yang dapat menunjang kinerja para pegawai sehingga seluruh proses bisnis yang ada pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan dapat menjadi SDM percontohan di lingkungan kerja. Selain itu dianggap perlu menimbulkan rasa kompetitif pegawai dalam hal perubahan ke arah yang lebih baik serta sistem penghargaan yang sistematis. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem terkait upaya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kepatuhan pengguna jasa melalui rangkaian kegiatan yang terdapat pada Sistem Pencegahan Pemberantasan Korupsi bagi Pegawai dan Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jasa (SIPPATUH).



## BAB IV PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2024.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Tahun 2024. Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2024 dapat tercapai dengan sangat baik.

Faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran strategis pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2024, antara lain:

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di perbatasan jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan diperbatasan dengan Malaysia.
2. Belum optimalnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-52/PMK.04/2019 tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang masih terjadi kendala teknis di lapangan.
3. Masih adanya jalur tikus di perbatasan yang penanganannya harus terintegrasi antar Bea Cukai, TNI, dan otoritas daerah setempat. Jalur tikus tersebut merupakan salah satu jalur utama untuk melakukan penyelundupan dari Malaysia.
4. Terbatasnya refinery di Kalimantan Barat sehingga pengusaha penghasil CPO mengirimkan hasil produksi ke refinery di luar Kalbar terutama ke perusahaan yang masih dalam satu Group.

Dalam rangka meningkatkan performa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dalam mencapai sasaran strategis, maka dilakukan beberapa upaya secara bertahap dengan:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat khususnya yang membidangi Kepegawaian untuk menambah jumlah SDM di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di Perbatasan.
2. Menggunakan Manajemen Risiko dalam pengawasan Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas, serta

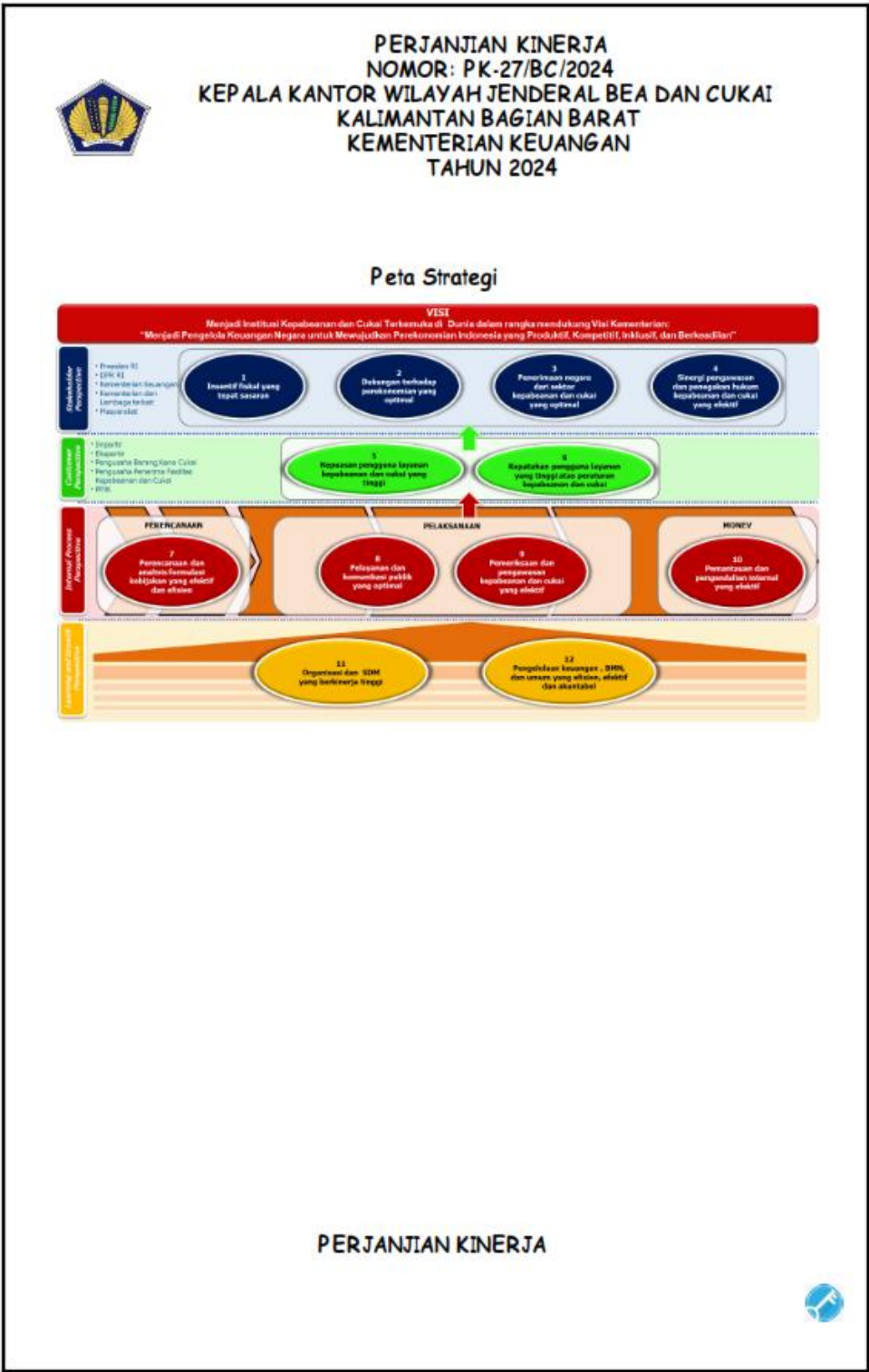
menggunakan Aplikasi SIPINTAR yang terintegrasi dan dikelola oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.

3. Melakukan koordinasi, sinergi, dan patroli bersama dengan Aparat Penegak Hukum yang berkepentingan di perbatasan, khususnya dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga melakukan pemetaan titik rawan jalur penyelundupan di perbatasan.
4. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melakukan diskusi dan *sharing session* dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti eksportir dan instansi terkait. Selain itu, juga dilakukan extra effort untuk memaksimalkan penerimaan dari ekspor atau impor komoditi lain yang melalui Kalimantan Barat.
5. Melakukan kegiatan *Sharing Session* kepada para pengusaha CPO dan instansi terkait untuk mendorong investasi di bidang refinery CPO dan mendorong perbaikan infrastruktur.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang seberapa jauh kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2024



**TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN**  
**BAGIAN BARAT**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No | Sasaran Program/ Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                         | 1a-N              | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan                           | 76%               |
| 2  | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                | 2a-N              | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                             | 82%               |
| 3  | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal            | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                                  | 100%              |
| 4  | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif   | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai               | 80%               |
| 5  | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 | 5a-N              | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                         | 3<br>(skala 4)    |
| 6  | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N              | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                            | 82%               |
| 7  | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan           | 81%               |
|    |                                                                            | 7b-N              | Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai                             | 3<br>(skala 4)    |
| 8  | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                               | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 81<br>(skala 100) |
|    |                                                                            | 8b-N              | Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai                                    | 82%               |
| 9  | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif               | 9a-N              | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 78%               |
|    |                                                                            | 9b-N              | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | 74,5%             |
| 10 | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                          | 10a-N             | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5%             |
|    |                                                                            | 10b-N             | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 82%               |
| 11 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                  | 11a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 81%               |
|    |                                                                            | 11b-N             | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82%               |



| No | Sasaran Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                      | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 12 | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran | 100    |

| Kegiatan |                                              | Anggaran  |                        |
|----------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1.       | <b>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b> | <b>Rp</b> | <b>1.963.122.000,-</b> |
| a.       | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi           | Rp        | 527.672.000,-          |
| b.       | Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan         | Rp        | 24.000.000,-           |
| c.       | Pengawasan dan Penegakan Hukum               | Rp        | 1.411.450.000,-        |
| 2.       | <b>Program Dukungan Manajemen</b>            | <b>Rp</b> | <b>5.974.353.000,-</b> |
| a.       | Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum           | Rp        | 5.927.733.000,-        |
| b.       | Pengelolaan Organisasi dan SDM               | Rp        | 46.620.000,-           |

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik  
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai  
Kali 1 Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Imik Eko Putro



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN  
BAGIAN BARAT  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

| No       | IKU                                                                               | Target |        |         |        |        |      |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|-------------|
|          |                                                                                   | Q1     | Q2     | Smt 1   | Q3     | s.d.Q3 | Q4   | Y           |
| <b>1</b> | <b>Insentif fiskal yang tepat sasaran</b>                                         |        |        |         |        |        |      |             |
| 1a-N     | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan                       | 40%    | 50%    | 50%     | 60%    | 60%    | 76%  | 76%         |
| <b>2</b> | <b>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</b>                                |        |        |         |        |        |      |             |
| 2a-N     | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                         | 6%     | 31%    | 31%     | 41%    | 41%    | 82%  | 82%         |
| <b>3</b> | <b>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</b>            |        |        |         |        |        |      |             |
| 3a-CP    | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                              | 23,82% | 47,04% | 47,04 % | 71,83% | 71,83% | 100% | 100%        |
| <b>4</b> | <b>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif</b>   |        |        |         |        |        |      |             |
| 4a-CP    | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai           | 37%    | 51%    | 51%     | 67%    | 67%    | 80%  | 80%         |
| <b>5</b> | <b>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</b>                 |        |        |         |        |        |      |             |
| 5a-N     | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                     | -      | -      | -       | -      | -      | 3    | 3 (skala 4) |
| <b>6</b> | <b>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</b> |        |        |         |        |        |      |             |
| 6a-N     | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                        |        | 41%    | 41%     | -      | 41%    | 82%  | 82%         |
| <b>7</b> | <b>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</b>      |        |        |         |        |        |      |             |
| 7a-N     | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan       | -      | 11%    | 11%     | 36%    | 36%    | 81%  | 81%         |
| 7b-N     | Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai                         | -      | 1      | 1       | 2      | 2      | 3    | 3 (skala 4) |
| <b>8</b> | <b>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</b>                               |        |        |         |        |        |      |             |
| 8a-N     | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                         | 81     | 81     | 81      | 81     | 81     | 81   | 81 (100)    |



| No        | IKU                                                                                   | Target |       |       |       |        |       |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|           |                                                                                       | Q1     | Q2    | Smt 1 | Q3    | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 8b-N      | Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai                                    | 82%    | 82%   | 82%   | 82%   | 82%    | 82%   | 82%   |
| <b>9</b>  | <b>Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</b>                   |        |       |       |       |        |       |       |
| 9a-N      | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 26%    | 50%   | 50%   | 65%   | 65%    | 78%   | 78%   |
| 9b-N      | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | 12%    | 32%   | 32%   | 62%   | 62%    | 74,5% | 74,5% |
| <b>10</b> | <b>Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif</b>                              |        |       |       |       |        |       |       |
| 10a-N     | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 11%    | 31%   | 31%   | 61%   | 61%    | 84,5% | 84,5% |
| 10b-N     | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 21%    | 41%   | 41%   | 61%   | 61%    | 82%   | 82%   |
| <b>11</b> | <b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>                                      |        |       |       |       |        |       |       |
| 11a-N     | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 81%    | 81%   | 81%   | 81%   | 81%    | 81%   | 81%   |
| 11b-N     | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 20,5%  | 40,5% | 40,5% | 60,5% | 60,5%  | 82%   | 82%   |
| <b>12</b> | <b>Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</b>        |        |       |       |       |        |       |       |
| 12a-N     | Indeks kualitas kinerja anggaran                                                      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100   | 100   |

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat,



Utamaatangi Secara Elektronik  
Imik Eko Putro



Lampiran II Adendum Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan  
Bagian Barat Tahun 2024

**ADDENDUM KONTRAK KINERJA**

**NOMOR: PK-27A/BC/2024**

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor: Perjanjian Kinerja Nomor: PK-27/BC/2024 tanggal 1 Januari 2024 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan/Penyesuaian Target Kinerja:

| Kode SS/IKU | Sasaran<br>Strategis/Indikator Kinerja Utama                                                                             | Sebelum |      |      |    |         |      |                | Menjadi |      |      |      |         |                |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----|---------|------|----------------|---------|------|------|------|---------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                          | Q1      | Q2   | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4   | Y              | Q1      | Q2   | Sm.1 | Q3   | s.d. Q3 | Q4             | Y              |
| 5a-N        | Kepuasan pengguna layanan kepabeanean dan cukai yang tinggi / Indeks kepuasan pengguna jasa                              |         |      |      |    |         |      | 3<br>(Skala 4) | -       | 3    | 3    | 3    | 3       | 3<br>(Skala 4) | 3<br>(Skala 4) |
| 6a-N        | Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanean dan Cukai / Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai |         | 41 % | 41 % |    |         | 82 % | 82 %           | -       | 41 % | 41 % | 60 % | 60 %    | 82 %           | 82 %           |

Menyetujui,  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik  
Askolani

Kota Pontianak, 14 Juni 2024

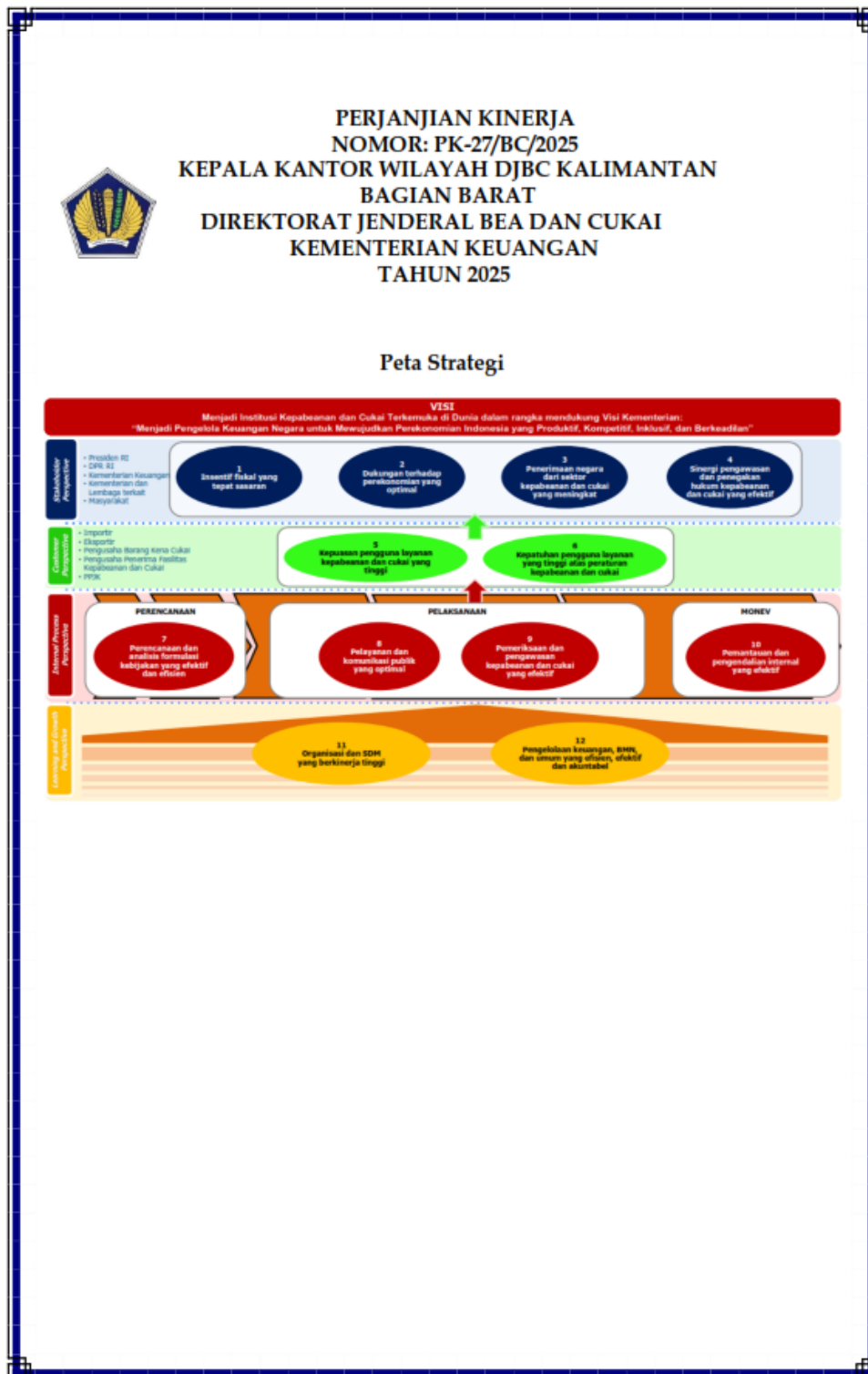
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Imik Eko Putro



Lampiran III Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                | Target            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                         | 1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan                 | 81%               |
| 2  | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                | 2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                   | 82,5%             |
| 3  | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat          | 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                       | 100%              |
| 4  | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif   | 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai    | 81%               |
| 5  | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 | 5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa                                               | 3,1<br>(skala 4)  |
| 6  | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai                               | 78%               |
| 7  | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      | 7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan | 82%               |
|    |                                                                            | 7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai                   | 3,1<br>(skala 4)  |
| 8  | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                               | 8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                   | 75<br>(skala 100) |
|    |                                                                            | 8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai                          | 83%               |
| 9  | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif               | 9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai    | 82%               |
|    |                                                                            | 9b-N Persentase efektivitas patroli laut                                         | 75%               |
| 10 | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                          | 10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional            | 80%               |
|    |                                                                            | 10b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal                      | 81%               |

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |                                             | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
| 11 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                               | 11a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai   | 82%    |
|    |                                                                         | 11b-N             | Persentase efektivitas manajemen organisasi | 80%    |
| 12 | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-N             | Indeks kualitas kinerja anggaran            | 100    |

**Program/Kegiatan Tahun 2025**

**Anggaran**

- |    |                                              |    |                        |
|----|----------------------------------------------|----|------------------------|
| 1. | <b>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b> | Rp | <b>2.059.130.000,-</b> |
| a. | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi           | Rp | 586.516.000,-          |
| b. | Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan         | Rp | 24.000.000,-           |
| c. | Pengawasan dan Penegakan Hukum               | Rp | 1.448.614.000,-        |
| 2. | <b>Program Dukungan Manajemen</b>            | Rp | <b>8.391.559.000,-</b> |
| a. | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum          | Rp | 8.344.939.000,-        |
| b. | Pengelolaan Organisasi dan SDM               | Rp | 46.620.000,-           |

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Jakarta, 24 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah DJBC  
Kalimantan Bagian Barat



Ditandatangani secara elektronik  
Askolani  
NIP 19660611 199202 1 001



Ditandatangani secara elektronik  
Imik Eko Putro  
19690508 198912 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

| No       | IKU                                                                               | Target |        |        |        |        |       |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------|
|          |                                                                                   | Q1     | Q2     | Smt 1  | Q3     | s.d.Q3 | Q4    | Y                |
| <b>1</b> | <b>Insentif fiskal yang tepat sasaran</b>                                         |        |        |        |        |        |       |                  |
| 1a-N     | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas KITE pembebasan                       | 41%    | 51%    | 51%    | 61%    | 61%    | 81%   | 81%              |
| <b>2</b> | <b>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</b>                                |        |        |        |        |        |       |                  |
| 2a-N     | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                         | 6%     | 31%    | 31%    | 41%    | 41%    | 82,5% | 82,5%            |
| <b>3</b> | <b>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat</b>          |        |        |        |        |        |       |                  |
| 3a-CP    | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                              | 19.50% | 43.37% | 43.37% | 71.11% | 71.11% | 100%  | 100%             |
| <b>4</b> | <b>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif</b>   |        |        |        |        |        |       |                  |
| 4a-CP    | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai           | 42,5%  | 56%    | 56%    | 69,5%  | 69,5%  | 81%   | 81%              |
| <b>5</b> | <b>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</b>                 |        |        |        |        |        |       |                  |
| 5a-N     | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                     | 3,1    | 3,1    | 3,1    | 3,1    | 3,1    | 3,1   | 3,1<br>(skala 4) |
| <b>6</b> | <b>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</b> |        |        |        |        |        |       |                  |
| 6a-N     | Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai                                     | 78%    | 78%    | 78%    | 78%    | 78%    | 78%   | 78%              |
| <b>7</b> | <b>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</b>      |        |        |        |        |        |       |                  |
| 7a-N     | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan       | 5%     | 12%    | 12%    | 37%    | 37%    | 82%   | 82%              |
| 7b-N     | Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai                         | 0,5    | 1      | 1      | 2      | 2      | 3,1   | 3,1<br>(skala 4) |
| <b>8</b> | <b>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</b>                               |        |        |        |        |        |       |                  |
| 8a-N     | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                         | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75    | 75<br>(100)      |
| 8b-N     | Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai                                | 83%    | 83%    | 83%    | 83%    | 83%    | 83%   | 83%              |
| <b>9</b> | <b>Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</b>               |        |        |        |        |        |       |                  |

| No        | IKU                                                                            | Target |     |       |     |        |     |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|-----|
|           |                                                                                | Q1     | Q2  | Smt 1 | Q3  | s.d.Q3 | Q4  | Y   |
| 9a-N      | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai       | 30%    | 55% | 55%   | 68% | 68%    | 82% | 82% |
| 9b-N      | Persentase efektivitas patroli laut                                            | 12%    | 32% | 32%   | 62% | 62%    | 75% | 75% |
| <b>10</b> | <b>Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif</b>                       |        |     |       |     |        |     |     |
| 10a-N     | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                | 12%    | 32% | 32%   | 62% | 62%    | 80% | 80% |
| 10b-N     | Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal                          | 21%    | 41% | 41%   | 61% | 61%    | 81% | 81% |
| <b>11</b> | <b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>                               |        |     |       |     |        |     |     |
| 11a-N     | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                      | 82%    | 82% | 82%   | 82% | 82%    | 82% | 82% |
| 11b-N     | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                    | 23%    | 38% | 38%   | 56% | 56%    | 80% | 80% |
| <b>12</b> | <b>Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</b> |        |     |       |     |        |     |     |
| 12a-N     | Indeks kualitas kinerja anggaran                                               | 100    | 100 | 100   | 100 | 100    | 100 | 100 |

Jakarta, 24 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah DJBC  
Kalimantan Bagian Barat



Ditandatangani secara elektronik

Imik Eko Putro  
19690508 198912 1 001